

KATALOG:
9101009.63

Analisis Isu Terkini Provinsi Kalimantan Selatan



2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



Analisis Isu Terkini Provinsi Kalimantan Selatan



2021

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Analisis Isu Terkini Provinsi Kalimantan Selatan 2021

ISBN : 978-623-7660-21-7
No. Publikasi : 63000.2140
Katalog BPS : 9101009.63
Ukuran Buku : B5 ISO (17,6 x 25,0 cm)
Jumlah Halaman : xii + 77 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Desain Sampul:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Gambar Sampul:

Unsplash (unsplash.com/@charlottelharrison)

Tata Letak:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Dicetak Oleh:

CV. Karya Bintang Musim (KBM)

Banjarbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan,
2021

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.”

Tim Penyusun

Pengarah

Yos Rusdiansyah

Penanggung Jawab

Awang Pramila

Editor

Awang Pramila

Indira Nur Qomari

Penulis dan Pengolah Data Tema 1

Ahmadi Murjani

Penulis dan Pengolah Data Tema 2

Zaky Musyarof

Penulis dan Pengolah Data Tema 3

Abdurrahman

Tata Letak, Sampul, dan Infografis

Zaky Musyarof



<https://kalsel.bps.go.id>



Kata Pengantar

Analisis Isu Terkini Provinsi Kalimantan Selatan 2021 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan yang menyajikan gambaran fenomena yang terjadi selama periode tahun 2020 hingga 2021. Fenomena-fenomena tersebut dibahas melalui analisis dan pengolahan data, baik secara sederhana maupun mendalam.

Tahun 2021 menjadi tahun pemulihan kondisi masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial, setelah menghadapi tahun 2020 yang sangat berat. Pandemi *Coronavirus Disease* atau Covid-19 merebak sejak awal tahun 2020 di seluruh dunia dan bulan Maret 2020 di Kalimantan Selatan. Tahun 2021 diyakini menjadi awal titik balik menuju kehidupan yang normal. Perbaikan terus diupayakan dalam kondisi pandemi yang mulai membaik, meskipun masih belum tuntas sepenuhnya.

Bagaimana kondisi masyarakat sejak diserang pandemi hingga akhir tahun 2021 dibahas dalam publikasi ini yang terbagi ke dalam 3 tema. Tema 1 membahas mengenai pembangunan yang *pro-poor*, tema 2 membahas mengenai pemerataan kesejahteraan pendapatan, serta tema 3 membahas mengenai kemiskinan sebelum dan saat terjadi pandemi.

Besar harapan publikasi ini bermanfaat sebagai rujukan dan wawasan baru bagi semua pihak yang membutuhkan. Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini.

Banjarbaru, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Selatan



Yos Rusdiansyah

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Tema 1. Pertumbuhan <i>Pro-Poor</i> di Kalimantan Selatan: Analisis Level Kabupaten/Kota	1
1. Pertumbuhan <i>Pro-Poor</i> dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	5
2. Konsep Pertumbuhan <i>Pro-Poor</i>	7
3. Metode Analisis Pertumbuhan <i>Pro-Poor</i>	8
a. Data	9
b. Kurva Insiden Pertumbuhan	9
c. Kurva Pertumbuhan Kemiskinan	10
4. Pertumbuhan <i>Pro-Poor</i> Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan	11
5. Kesimpulan dan Saran	22
6. Referensi	24
Tema 2. Autokorelasi Spasial Ketimpangan di Kalimantan Selatan	25
1. Pentingnya Keterkaitan Kesejahteraan antar Wilayah	27
2. Bagaimana Analisis Data Spasial Bekerja	30
3. Kesejahteraan antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	38
a. Perkembangan Rasio Gini di Kalimantan Selatan	38
b. Konektivitas Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	39
c. Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2015	41
d. Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2016	42
e. Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2017	44
f. Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2018	45
g. Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2019	47

h. Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2020	48
4. Pentingnya Pemerataan Kesejahteraan	50
5. Referensi	51
Tema 3. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan	55
1. Covid-19 Berdampak pada Aspek yang Lebih Luas	60
2. Ekonomi pada Akhirnya Mengalami Resesi	62
3. Perangkap Kemiskinan Semakin Menganga	65
4. Konsumsi Masyarakat Terdampak Karena Pandemi	70
5. Bangkit dari Pandemi Covid-19	73
6. Referensi	75



<https://kalsel.bps.go.id>



Daftar Tabel

Tabel 3.1	Rata-rata <i>Budget Share</i> Kelompok Komoditas Makanan Tahun 2019 dan Tahun 2021 (Persen)	72
-----------	---	----

<https://kalsel.bps.go.id>



<https://kalsel.bps.go.id>



Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Kurva Insiden Pertumbuhan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan 2016-2020	11
Gambar 1.2.	Kurva Pertumbuhan Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan 2016-2020	17
Gambar 2.1.	<i>Rook Contiguity</i>	33
Gambar 2.2.	<i>Bishop Contiguity</i>	33
Gambar 2.3.	<i>Queen Contiguity</i>	34
Gambar 2.4.	Rasio Gini Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2020	39
Gambar 2.5.	Konektivitas Berdasarkan Kedekatan Wilayah dengan Queen Contiguity	40
Gambar 2.6.	Indeks Moran Rasio Gini Tahun 2015	41
Gambar 2.7.	Hasil Pengujian Signifikansi Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2015	42
Gambar 2.8.	Indeks Moran Rasio Gini Tahun 2016	43
Gambar 2.9.	Hasil Pengujian Signifikansi Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2016	43
Gambar 2.10.	Indeks Moran Rasio Gini Tahun 2017	44
Gambar 2.11.	Hasil Pengujian Signifikansi Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2017	45
Gambar 2.12.	Indeks Moran Rasio Gini Tahun 2018	46
Gambar 2.13.	Hasil Pengujian Signifikansi Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2018	46
Gambar 2.14.	Indeks Moran Rasio Gini Tahun 2019	47
Gambar 2.15.	Hasil Pengujian Signifikansi Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2019	48
Gambar 2.16.	Indeks Moran Rasio Gini Tahun 2020	49
Gambar 2.17.	Hasil Pengujian Signifikansi Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2020	49

Gambar 3.1.	Jumlah Kasus Kumulatif Terinfeksi Covid-19, Sembuh dan Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia dan Dunia, 1 Desember 2021	59
Gambar 3.2.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (yoy) Kuartal I 2018 – Kuartal III 2021	64
Gambar 3.3.	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan (yoy) Kuartal I 2015 – Kuartal III 2021	65
Gambar 3.4.	Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Kalimantan Selatan, Maret 2015 – Maret 2021	67
Gambar 3.5.	Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan, Maret 2015 – Maret 2021	68
Gambar 3.6.	Distribusi Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran, Maret 2015 – Maret 2021	69



**Tema 1. Pertumbuhan *Pro-Poor*
di Kalimantan Selatan: Analisis
Level Kabupaten dan Kota**



1. PERTUMBUHAN PRO-POOR DI KALIMANTAN SELATAN: ANALISIS TABEL KABUPATEN DAN KOTA

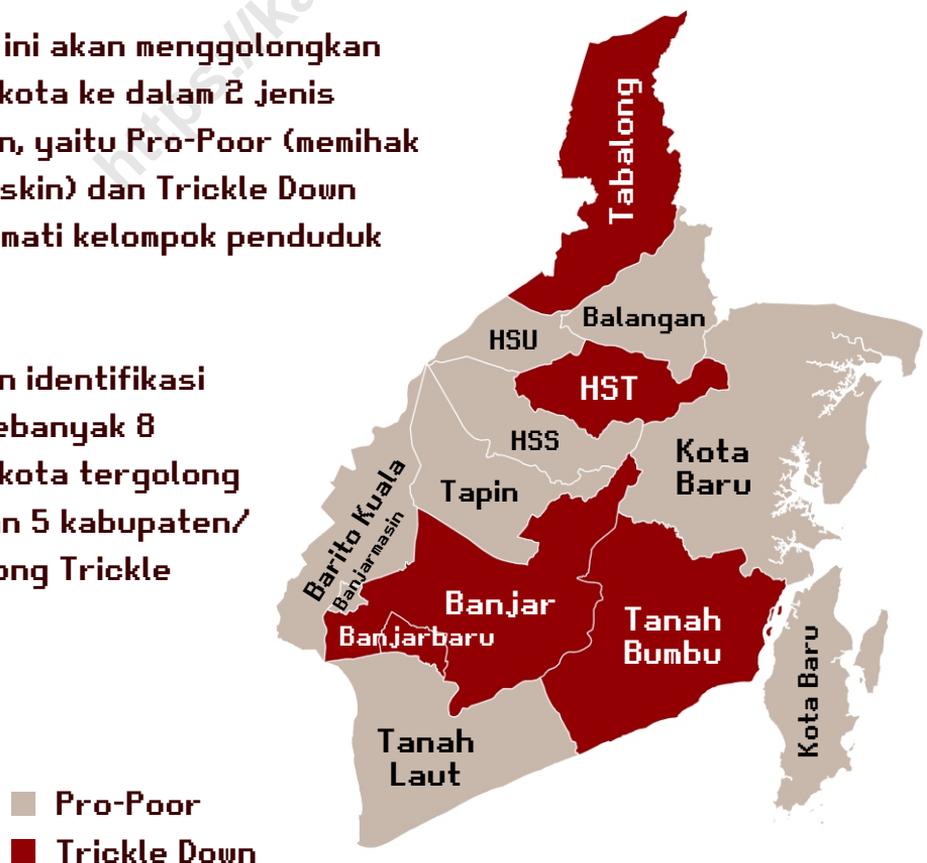
Pertumbuhan Pro-Poor merupakan pertumbuhan yang memihak kelompok penduduk berpendapatan rendah, atau dapat dikatakan merupakan pertumbuhan yang merata dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan Pro-Poor akan mengurangi kemiskinan dengan adanya pengurangan kesenjangan.

Metode Identifikasi Pertumbuhan Pro-Poor:

1. Kurva Insiden Pertumbuhan
2. Kurva Pertumbuhan Kemiskinan

Identifikasi ini akan menggolongkan kabupaten/kota ke dalam 2 jenis pertumbuhan, yaitu Pro-Poor (memihak penduduk miskin) dan Trickle Down (hanya dinikmati kelompok penduduk tertentu).

Berdasarkan identifikasi tersebut, sebanyak 8 kabupaten/kota tergolong Pro-Poor dan 5 kabupaten/kota tergolong Trickle Down.





Tema 1

Pertumbuhan *Pro-Poor* di Kalimantan Selatan: Analisis Level Kabupaten dan Kota

“Poverty is not an accident. Like slavery and apartheid, it is man made and can be removed by the actions of human beings.”

Nelson Mandela (Presiden Afrika Selatan Periode 1994-1999 dan revolusioner antiapartheid)

1. Pertumbuhan *Pro-Poor* dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi sudah seharusnya dinikmati seluruh lapisan masyarakat yang tercermin dari peningkatan pendapatan yang merata. Dengan demikian, akan dimungkinkan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Akan tetapi, pertumbuhan yang terjadi kadang memperlebar kesenjangan di masyarakat. Artinya, golongan yang lebih sejahtera menikmati sebagian besar manfaat dari pertumbuhan tersebut, sedangkan golongan yang kurang beruntung (golongan miskin) hanya memperoleh segelintir bagian.

Kemiskinan, pertumbuhan, dan kesenjangan memang sejatinya adalah tiga serangkai yang tidak terpisahkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mensasar tiga variabel tersebut di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kemiskinan terdapat pada Tujuan Nomor 1 (*No Poverty*), Pertumbuhan Ekonomi berada pada Tujuan Nomor 8 (*Decent Work and Economic Growth*), dan Kesenjangan ada di Tujuan Nomor 10 (*Reduced Inequalities*).

Untuk mencapai ketiga tujuan di atas bukan perkara mudah karena adanya dinamika di dalam interaksi variabel-variabel tersebut. Idealnya, pertumbuhan bisa mengurangi kemiskinan dengan adanya pengurangan kesenjangan. Tapi pada kenyataannya, kesenjangan kadang meningkat dengan adanya pertumbuhan, yang merupakan masalah baru dalam upaya pemerataan pendapatan (Kakwani, 2000). Untuk menganalisis lebih mendalam, dipergunakan istilah pertumbuhan yang memihak orang miskin (*pro-poor growth*) yang di dalam tulisan ini diistilahkan dengan Pertumbuhan *Pro-Poor*.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi pertumbuhan di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan jika dikaitkan dengan keberpihakan terhadap orang miskin. Untuk memperoleh jawaban atas tujuan penelitian tersebut, tulisan ini menggunakan metode analisis Pertumbuhan *Pro-Poor* dengan pendekatan visual/grafis yang belum banyak digunakan pada level kabupaten dan kota khususnya di Kalimantan Selatan.



2. Konsep Pertumbuhan *Pro-Poor*

Memahami konsep Pertumbuhan *Pro-Poor* merupakan bagian yang sangat krusial dalam meneliti interaksi variabel pertumbuhan, kemiskinan, dan kesenjangan. Perbedaan konsep definisi dan pendekatan antara para peneliti merupakan sebab utama mengapa pemahaman konsep menjadi kunci penting pada penelitian di topik ini.

Menurut Ravallion (2004), konsep Pertumbuhan *Pro-Poor* dibedakan menjadi dua. Pertama, Pertumbuhan dikatakan *Pro-Poor* jika terjadi pergeseran distribusi pendapatan yang dikarenakan pertumbuhan ekonomi dan memihak pada golongan miskin. Dengan kata lain, pendapatan golongan miskin akan tumbuh lebih besar daripada mereka yang lebih sejahtera. Jadi, kata kunci pada konsep pertama ini adalah pergeseran distribusi pendapatan. Konsep ini memiliki kelemahan pada periode terjadinya kontraksi dan ekspansi perekonomian. Pada periode kontraksi, pertumbuhan bisa bersifat *Pro-Poor* akan tetapi tidak terdapat dampak absolut pada golongan miskin. Sebaliknya, pada periode ekspansi, pergeseran distribusi pendapatan akan lebih memihak golongan sejahtera akan tetapi dampak positif akan lebih banyak diserap oleh golongan miskin. Untuk menjembatani kekurangan pada konsep tersebut, muncul konsep kedua yaitu pertumbuhan *Pro-Poor* terjadi jika pertumbuhan ekonomi bisa mengurangi kemiskinan yang tercermin dari indikator-indikator kemiskinan. Artinya, golongan miskin mendapat dampak positif yang absolut dari pertumbuhan.



Konsep yang diperkenalkan oleh Ravallion (2004) kemudian dilengkapi oleh Kakwani et al. (2004) dengan membedakan definisi *Pro-Poor* menjadi Lemah dan Kuat. Pertumbuhan dikatakan *Pro-Poor* Lemah jika golongan miskin mendapatkan manfaat dari pertumbuhan yang secara proporsi lebih sedikit daripada golongan sejahtera (definisi ini juga dikenal dengan istilah efek *trickle-down*). Sedangkan untuk *Pro-Poor* yang Kuat, dibedakan menjadi relatif dan absolut. Pertumbuhan *Pro-Poor* Relatif terjadi jika pertumbuhan bisa menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan relatif. Pertumbuhan *Pro-Poor* Absolut terjadi jika golongan miskin mendapatkan manfaat absolut dari pertumbuhan sama atau lebih besar daripada golongan yang sejahtera.

3. Metode Analisis Pertumbuhan *Pro-Poor*

Secara umum, terdapat dua metode untuk menganalisis Pertumbuhan *Pro-Poor* yaitu Metode Parsial (*partial approach*) dan Metode Penuh (*full approach*). Metode Parsial lebih menitikberatkan pada pengamatan visual/grafis tanpa harus menentukan batasan kemiskinan. Metode ini diimplementasikan menggunakan Kurva Insiden Pertumbuhan (*Growth Incidence Curve*) dan Kurva Pertumbuhan Kemiskinan (*Poverty Growth Curve*). Sedangkan Metode Penuh menggunakan indeks untuk penentuan status *Pro-Poor*, contohnya yaitu Tingkat Pertumbuhan Setara Kemiskinan (*Poverty Equivalent Growth Rate*) dan Indeks Pertumbuhan *Pro-Poor* (*Pro-Poor Growth Index*). Untuk membatasi metode yang digunakan dalam tulisan ini, Metode



Parsial akan digunakan dengan pertimbangan kepraktisan dalam pengaplikasian. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa pendekatan visual akan bisa bersifat subjektif, karena tidak menggunakan suatu besaran angka. Terkadang, hasil pengamatan tidak bisa menghasilkan kesimpulan (*inconclusive result*).

a. Data

Untuk melengkapi Metode Parsial, tulisan ini menggunakan data rumah tangga yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2016 dan 2020 untuk level kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai alat bantu penghitungan, digunakan software STATA dengan modul DASP yang dibuat oleh Araar dan Duclos (2007).

b. Kurva Insiden Pertumbuhan

Metode ini diperkenalkan oleh Ravallion dan Chen pada tahun 2003 yang menitikberatkan pada pengamatan visual distribusi pertumbuhan pendapatan (yang mana di-*proxy* oleh pengeluaran pada tulisan ini) di tiap-tiap persentil. Kurva Insiden Pertumbuhan dapat digambarkan sebagai perubahan proporsional pada pengeluaran per kapita sebagai berikut:

$$\gamma^t(p_i) = \frac{y^t(p_i) - y^{t-1}(p_i)}{y^{t-1}(p_i)}$$

dimana:

$\gamma^t(p_i)$: pertumbuhan pengeluaran tahun t pada persentil ke- i .

$y^t(p_i)$: pengeluaran tahun t pada persentil ke- i .

$y^{t-1}(p_i)$: pengeluaran tahun $t-1$ pada persentil ke- i .



Status Pertumbuhan *Pro-Poor* akan ditentukan oleh kemiringan Kurva Insiden Pertumbuhan. Pertumbuhan akan dikatakan *Pro-Poor* jika kemiringan kurva menurun sepanjang persentil, sebaliknya pertumbuhan akan dikatakan tidak *Pro-Poor* jika kurva cenderung meningkat sepanjang persentil (pertumbuhan ke persentil pengeluaran lebih tinggi semakin meningkat).

c. Kurva Pertumbuhan Kemiskinan

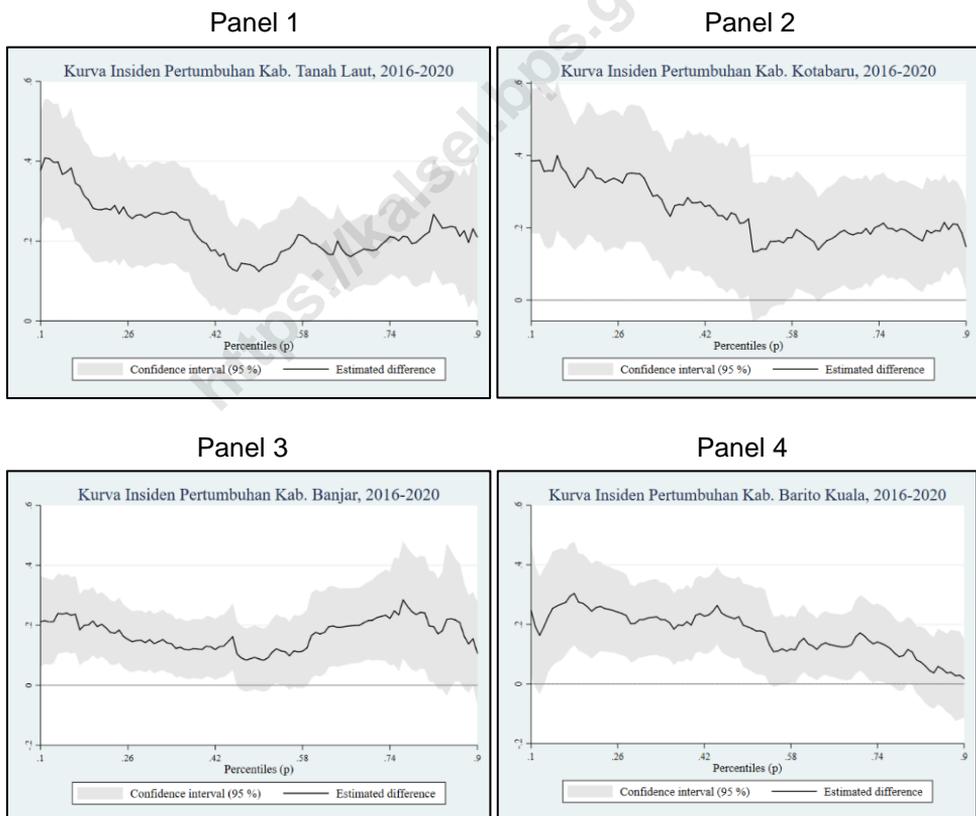
Metode ini diperkenalkan oleh Son (2004) dengan mengamati persentase *share* pengeluaran pada berbagai tingkatan. Metode ini menitikberatkan amatan pada Kurva Lorenz yang digeneralisasi. Kurva Pertumbuhan Kemiskinan terbentuk dari tingkat pertumbuhan pada tiap tingkatan pengeluaran, yang mana semua individu/rumah tangga telah terurut berdasarkan tingkatan pengeluaran per kapita mereka. Pada pendekatan Kurva Pertumbuhan Kemiskinan, pertumbuhan dikatakan *Pro-Poor* jika posisi kurva berada di atas rata-rata pada semua level persentil yang merupakan posisi ujung kurva Son (2004). Jika posisi kurva amatan berada di antara nol dan ujung kurva, maka pertumbuhan dikatakan *trickle-down*. Terakhir, jika posisi kurva amatan berada di bawah nol, dan ujung kurva berada di atas nol, maka pertumbuhan diartikan sebagai pertumbuhan yang menciptakan kemiskinan (*immiserizing growth*).



4. Pertumbuhan *Pro-Poor* Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan

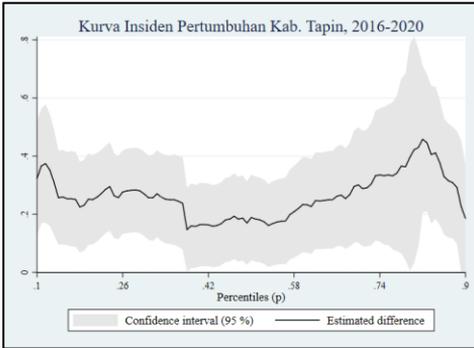
Berikut disajikan grafik hasil pengolahan STATA untuk Metode Kurva Insiden Pertumbuhan di kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Grafik tersaji pada Gambar 1.1 yang terdiri dari 13 panel yang mewakili 13 kabupaten dan kota.

Gambar 1.1. Kurva Insiden Pertumbuhan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan 2016-2020

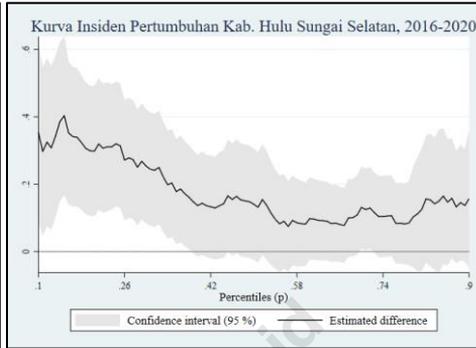


Gambar 1.1. (Lanjutan)

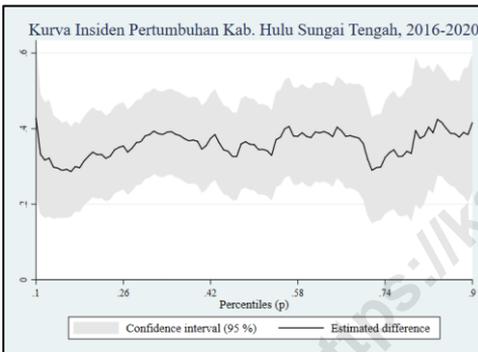
Panel 5



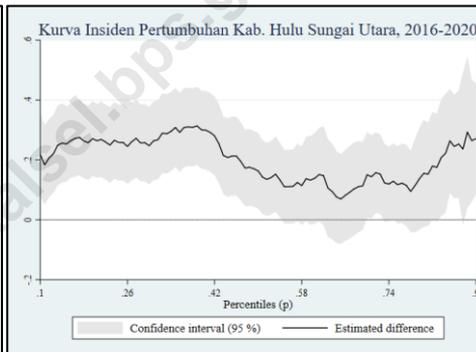
Panel 6



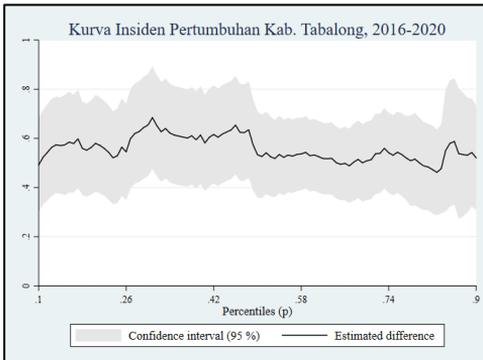
Panel 7



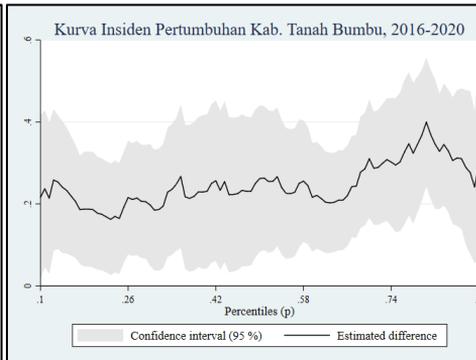
Panel 8



Panel 9

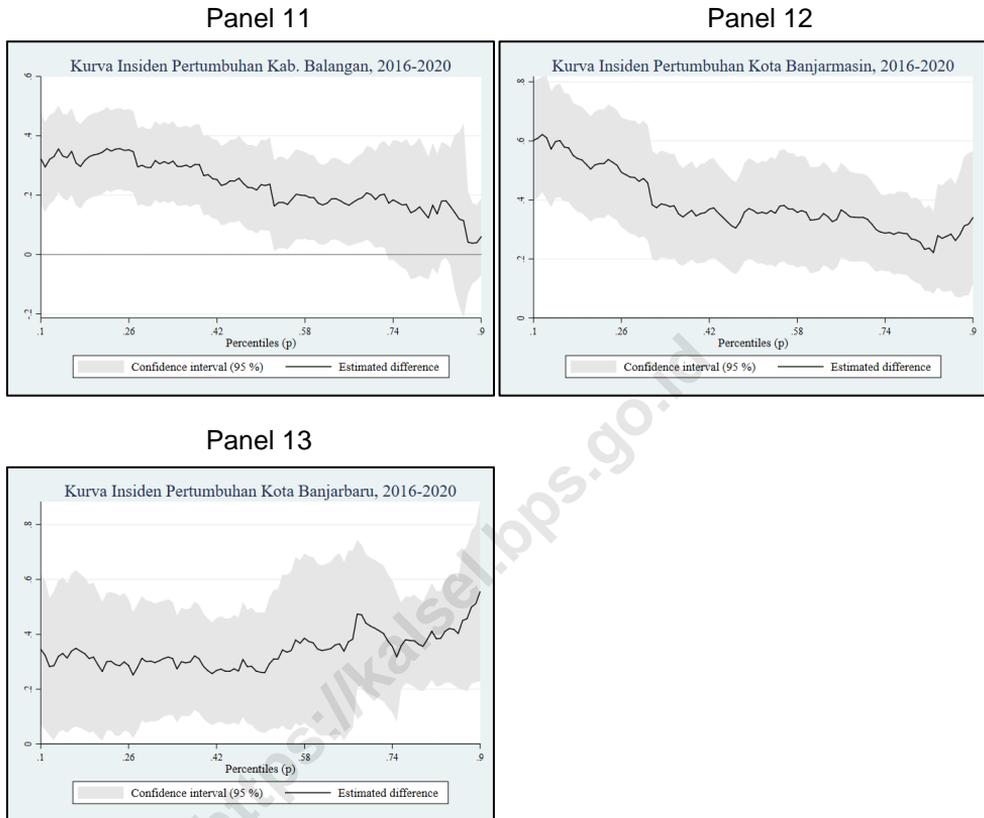


Panel 10





Gambar 1.1. (Lanjutan)



Secara umum, berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, pengeluaran perkapita masyarakat seluruh kabupaten kota di provinsi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan yang nilainya positif (di atas nol). Hal ini terjadi pula pada semua lapisan persentil. Untuk menganalisis Kurva Insiden Pertumbuhan, harus dilakukan pengamatan pada kemiringan kurva. Ini dilakukan untuk mendeteksi apakah pertumbuhan yang terjadi sudah bersifat *Pro-Poor* atau tidak. Hasil



pengamatan pada Panel 1 sampai dengan 13 bisa dituliskan sebagai berikut:

- Panel 1, yaitu Kurva Insiden Pertumbuhan Kabupaten Tanah Laut, menunjukkan tren menurun atau memiliki kemiringan negatif dari persentil terendah ke persentil tertinggi. Jadi bisa disimpulkan dalam periode 2016-2020, pertumbuhan di Kabupaten Tanah Laut adalah *Pro-Poor*.
- Panel 2, yaitu Kurva Insiden Pertumbuhan Kabupaten Kotabaru, menunjukkan tren menurun atau memiliki kemiringan negatif. Bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan di Kabupaten Kotabaru adalah *Pro-Poor*.
- Panel 3, yaitu Kurva Insiden Pertumbuhan Kabupaten Banjar, menunjukkan tren menurun pada sebagian persentil dan meningkat pada bagian lainnya. Berdasarkan analisis visual Kurva Insiden Pertumbuhan, belum bisa disimpulkan apakah pertumbuhan di Kabupaten Banjar bersifat *Pro-Poor* atau tidak (*inconclusive*).
- Panel 4, yaitu Kurva Insiden Pertumbuhan Kabupaten Barito Kuala, memiliki kemiringan negatif. Bahkan pertumbuhan di persentil teratas mendekati nol. Bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan di Kabupaten Barito Kuala adalah *Pro-Poor*.
- Panel 5, yaitu Kurva Insiden Pertumbuhan Kabupaten Tapin, menunjukkan tren menurun pada sebagian persentil dan meningkat pada bagian lainnya. Belum bisa disimpulkan apakah pertumbuhan di Kabupaten Tapin bersifat *Pro-Poor* atau tidak (*inconclusive*).



- Panel 6, yaitu Kurva Insiden Pertumbuhan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menunjukkan tren menurun atau memiliki kemiringan negatif dari persentil terendah ke persentil tertinggi. Pada periode 2016-2020, pertumbuhan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah *Pro-Poor*.
- Panel 7, yaitu Kurva Insiden Pertumbuhan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menunjukkan fluktuasi akan tetapi cenderung mendatar. Belum bisa disimpulkan apakah pertumbuhan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersifat *Pro-Poor* atau tidak (*inconclusive*).
- Panel 8, yaitu Kurva Insiden Pertumbuhan Kabupaten Hulu Sungai Utara, memiliki kemiripan dengan kabupaten tetangganya yaitu Hulu Sungai Tengah. Kondisi pertumbuhan di Kabupaten Hulu Sungai Utara bersifat *inconclusive*.
- Panel 9, yaitu Kurva Insiden Pertumbuhan di Kabupaten Tabalong, memiliki tren mendatar. Memang terjadi beberapa kenaikan dan penurunan kurva, akan tetapi tidak begitu signifikan. Pertumbuhan di Kabupaten Tabalong juga *inconclusive*.
- Panel 10, yaitu Kurva Insiden Pertumbuhan Kabupaten Tanah Bumbu, memiliki tren meningkat. Meskipun meningkat, pada persentil teratas terjadi penurunan tren; akan tetapi tidak mengubah tren secara keseluruhan. Pertumbuhan di Kabupaten Tanah Bumbu tidak *Pro-Poor*.
- Panel 11, yaitu Kurva Insiden Pertumbuhan Kabupaten Balangan, memiliki kemiringan negatif. Pertumbuhan di Kabupaten Balangan adalah *Pro-Poor*.

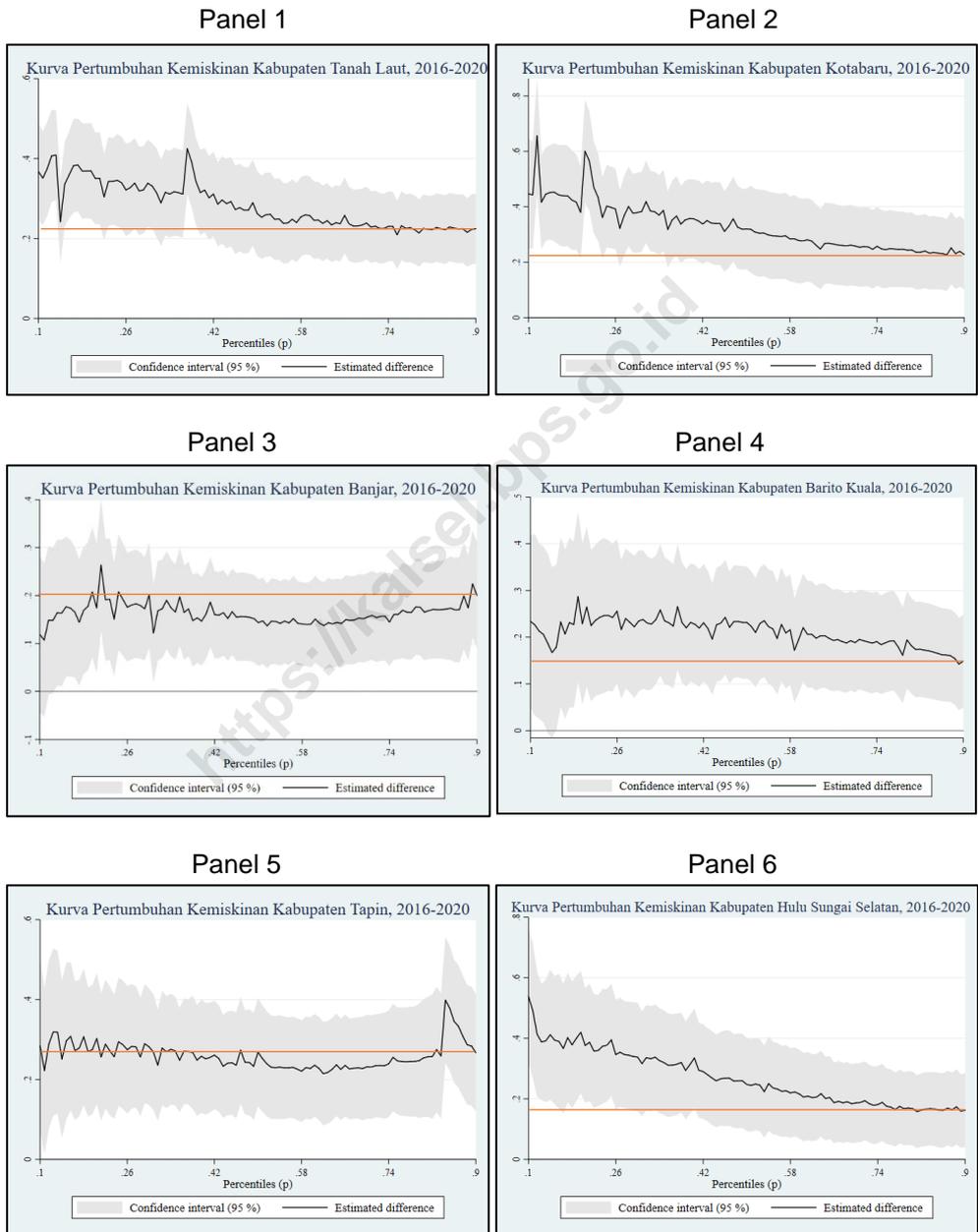


- Panel 12, yaitu Kurva Insiden Pertumbuhan Kota Banjarmasin, memiliki kemiringan negatif secara umum, miskin terdapat sedikit kenaikan pada persentil atas. Pertumbuhan di Kota Banjarmasin adalah *Pro-Poor*.
- Panel 13, yaitu Kurva Insiden Pertumbuhan Kota Banjarbaru, memiliki kecenderungan meningkat, terutama pada persentil di lapisan menengah ke atas. Pertumbuhan di Kota Banjarbaru tidak *Pro-Poor*.

Untuk mendapatkan kesimpulan mengenai kondisi pertumbuhan *Pro-Poor* kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, tulisan ini juga menggunakan metode visual lainnya yaitu Kurva Pertumbuhan Kemiskinan. Dengan metode ini, kesimpulan dari pengamatan kurva akan lebih tegas. Dengan kata lain, kesimpulan yang belum bisa diperoleh pada pendekatan sebelumnya akan diteliti kembali dengan metode ini. Gambar 2.2 menunjukkan hasil dari pengolahan data ke dalam bentuk Kurva Pertumbuhan Kemiskinan.

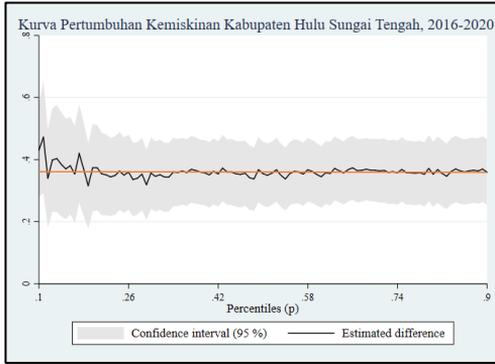


Gambar 1.2. Kurva Pertumbuhan Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan 2016-2020

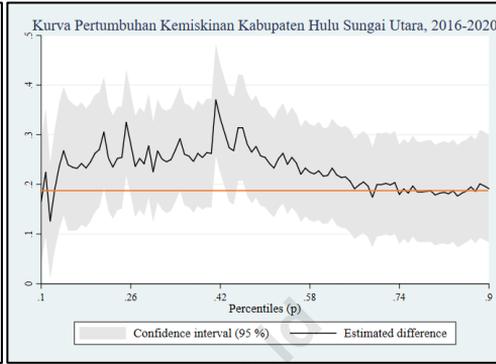


Gambar 1.2. (Lanjutan)

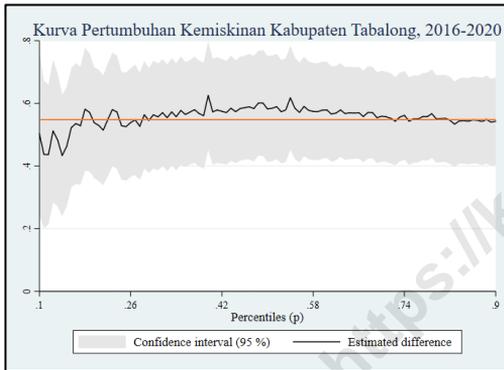
Panel 7



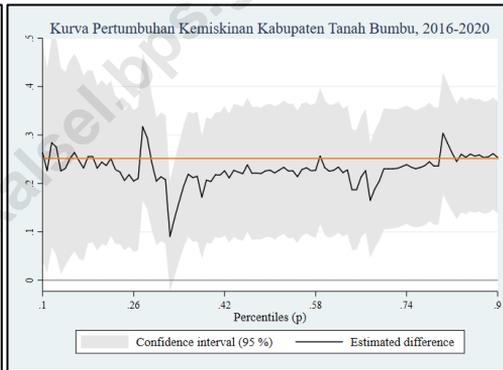
Panel 8



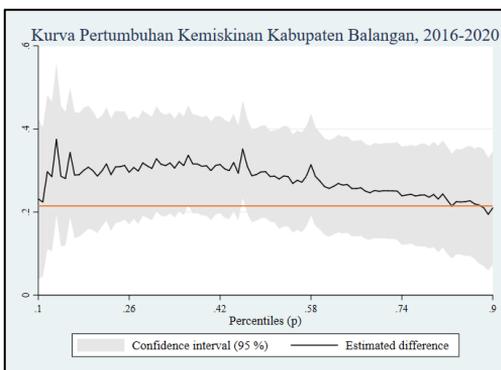
Panel 9



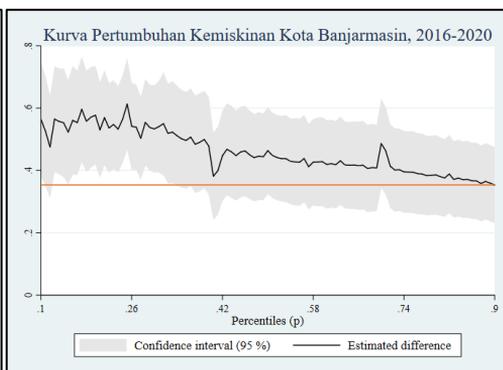
Panel 10



Panel 11



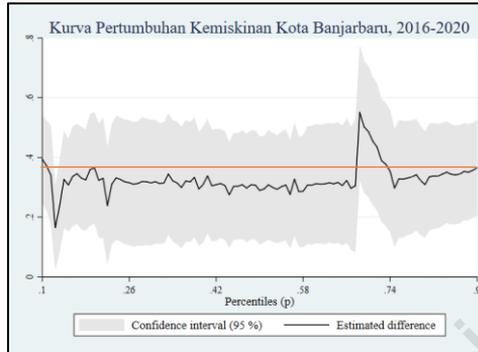
Panel 12





Gambar 1.2. (Lanjutan)

Panel 13



Secara umum, berdasarkan Gambar 2.2, pertumbuhan kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan bernilai positif yang bisa diartikan bahwa pertumbuhan di Kalimantan Selatan tidak menciptakan kemiskinan. Gambar 2 juga menegaskan kondisi *Pro-Poor* yang dihasilkan dari Gambar 1, terutama pada hasil yang belum bisa dipastikan (*inconclusive*). Hasil pengamatan pada Gambar 2 bisa diuraikan sebagai berikut:

- Panel 1, yaitu Kurva Pertumbuhan Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut, menunjukkan bahwa persentil di bagian bawah yang merupakan kumpulan golongan miskin berada di atas rata-rata semua golongan (garis merah). Jadi disimpulkan bahwa dalam periode 2016-2020, pertumbuhan di Kabupaten Tanah Laut adalah *Pro-Poor*.
- Panel 2, yaitu Kurva Pertumbuhan Kemiskinan Kabupaten Kotabaru, menunjukkan persentil di bagian bawah berada di atas rata-rata semua golongan pengeluaran. Disimpulkan bahwa pertumbuhan di Kabupaten Kotabaru adalah *Pro-Poor*.



- Panel 3, yaitu Kurva Pertumbuhan Kemiskinan Kabupaten Banjar, menunjukkan bahwa pertumbuhan sebagian besar golongan di persentil bawah berada di bawah rata-rata semua golongan. Artinya, dalam kurun waktu 2016-2020, pertumbuhan di Kabupaten Banjar bersifat *trickle-down*, suatu kondisi dimana sebagian besar manfaat dari pertumbuhan diserap oleh golongan yang lebih sejahtera.
- Panel 4, yaitu Kurva Pertumbuhan Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala, seluruh persentil di bagian terbawah berada di atas nilai rata-rata pertumbuhan semua golongan. Disimpulkan bahwa pertumbuhan di Kabupaten Barito Kuala adalah *Pro-Poor*.
- Panel 5, yaitu Kurva Pertumbuhan Kemiskinan Kabupaten Tapin, memperlihatkan bahwa secara umum golongan yang berada di persentil terbawah memiliki pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan seluruh golongan. Memang bisa dilihat ada beberapa individu yang berada di bawah garis merah, akan tetapi sebagian besar berada sebaliknya. Setidaknya posisi di atas garis merah ini terlihat sampai dengan persentil ke-30. Pertumbuhan di Kabupaten Tapin bisa disimpulkan *Pro-Poor*.
- Panel 6, yaitu Kurva Pertumbuhan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jelas menunjukkan bahwa golongan persentil bawah memiliki pertumbuhan di atas rata-rata. Jadi pada periode 2016-2020, pertumbuhan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah *Pro-Poor*.
- Panel 7, yaitu Kurva Pertumbuhan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menunjukkan pertumbuhan sebagian besar



persentil bawah berada di bawah nilai rata-rata. Pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata memang terjadi di persentil terbawah, akan tetapi kondisi tersebut terus menurun seiring pergerakan ke golongan persentil bawah lainnya. Pertumbuhan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bisa disimpulkan *trickle-down*. Karena sangat tipisnya perbedaan antara nilai rata-rata dan pertumbuhan di sepanjang persentil, disarankan untuk menggunakan metode index (*full approach*) untuk memastikan kondisi pertumbuhan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Panel 8, yaitu Kurva Pertumbuhan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menunjukkan bahwa sebagian besar golongan pada persentil bawah memiliki pertumbuhan di atas rata-rata. Dengan demikian, disimpulkan bahwa kondisi pertumbuhan di Kabupaten Hulu Sungai Utara bersifat *Pro-Poor*.
- Panel 9, yaitu Kurva Pertumbuhan Kemiskinan di Kabupaten Tabalong, menunjukkan sebagian besar (setidaknya sampai persentil 30) nilai pertumbuhan persentil bawah berada di bawah rata-rata. Pada sekitar persentil 40 sampai dengan persentil 70, nilai pertumbuhannya berada di atas rata-rata semua golongan. Jika melihat kondisi sampai dengan persentil ke-30, bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan di Kabupaten Tabalong bersifat *trickle-down*.
- Panel 10, yaitu Kurva Pertumbuhan Kemiskinan Kabupaten Tanah Bumbu, menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan pada persentil bawah sebagian besar berada di bawah rata-rata. Di bagian persentil bawah, terdapat beberapa posisi dimana nilai pertumbuhan berada di atas rata-rata namun tidak sebanyak



posisi yang berada di bawah. Pertumbuhan di Kabupaten Tanah Bumbu bersifat *trickle-down*.

- Panel 11, yaitu Kurva Pertumbuhan Kemiskinan Kabupaten Balangan, memperlihatkan bahwa nilai pertumbuhan di persentil bawah berada di atas rata-rata. Pertumbuhan di Kabupaten Balangan bersifat *Pro-Poor*.
- Panel 12, yaitu Kurva Pertumbuhan Kemiskinan Kota Banjarmasin, memperlihatkan nilai pertumbuhan golongan di persentil bawah berada di atas rata-rata semua golongan. Disimpulkan bahwa pertumbuhan di Kota Banjarmasin adalah *Pro-Poor*.
- Panel 13, yaitu Kurva Pertumbuhan Kemiskinan Kota Banjarbaru, menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan pada golongan persentil bawah berada di bawah rata-rata. Jadi pertumbuhan di Kota Banjarbaru bersifat *trickle-down*.

5. Kesimpulan dan Saran

Dimasukkannya variabel kemiskinan, pertumbuhan, dan kesenjangan ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menjadikan ketiga variabel tersebut semakin banyak diteliti dan diperhatikan oleh banyak pihak. Akan tetapi, interaksi ketiganya yang sangat dinamis menjadikan pengaruh variabel yang satu kepada variabel yang lain terkadang tidak sesuai dengan teori dan ekspektasi. Idealnya, pertumbuhan menciptakan kondisi yang membuat kemiskinan menurun dengan diiringi semakin menurunnya kesenjangan. Pertumbuhan yang memihak orang miskin, atau *Pro-Poor Growth*, merupakan kondisi ideal yang



diinginkan oleh semua pihak. Tulisan ini bertujuan untuk meneliti apakah pertumbuhan kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan pada periode 2016-2020 sudah bersifat *Pro-Poor* atau tidak.

Dengan menggabungkan dua metode, yaitu Kurva Insiden Pertumbuhan dan Kurva Pertumbuhan Kemiskinan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh rumah tangga dan individu di Kalimantan Selatan, yang tercermin dari pengeluaran perkapita pada semua golongan pengeluaran, bernilai positif. Artinya, semua lapisan masyarakat menikmati hasil dari pertumbuhan tersebut.
- Beberapa kabupaten dan kota memiliki pertumbuhan yang bersifat *Pro-Poor*, diantaranya adalah Tanah Laut, Kotabaru, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Banjarmasin.
- Sisanya merupakan kabupaten dan kota yang bersifat *trickle-down* (pertumbuhan positif tapi sebagian besar dampaknya dinikmati oleh golongan yang lebih sejahtera) diantaranya adalah Banjar, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Banjarbaru.

Sebagai saran kepada pengambil kebijakan, program-program yang menysasar kepada masyarakat miskin supaya diteruskan dan dilengkapi dengan adanya pembaharuan daftar penerima bantuan. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi penurunan kesenjangan di masyarakat. Pemerintah Daerah juga harus senantiasa memonitor indikator-indikator makro seperti

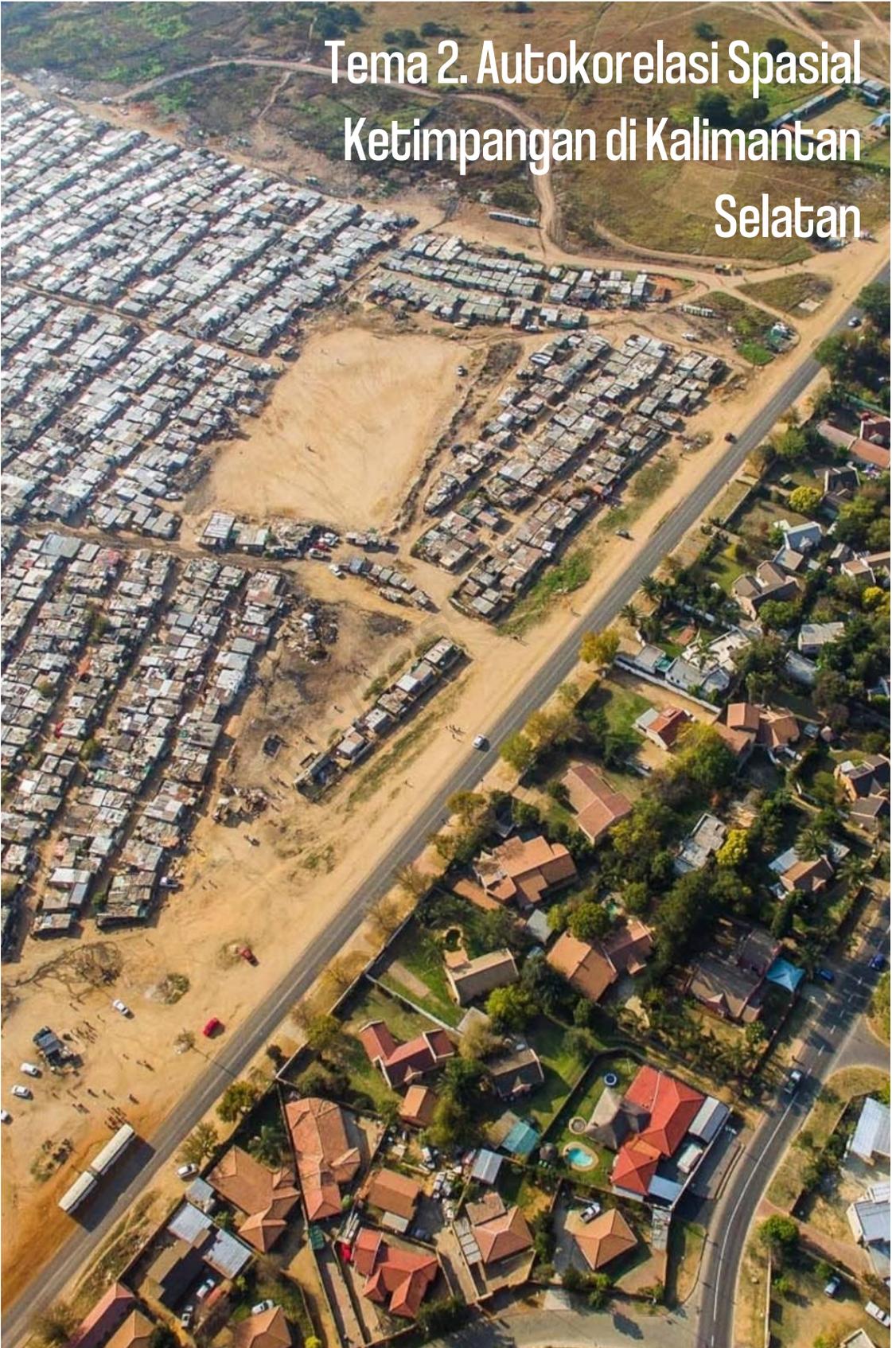


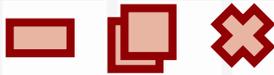
persentase kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kesenjangan sebagai bahan evaluasi program yang telah dilaksanakan sekaligus sebagai bahan perencanaan untuk program selanjutnya. Untuk peneliti, penggunaan metode pengamatan visual bisa dilengkapi dengan menggunakan metode index yang menghasilkan kesimpulan yang lebih solid.

6. Referensi

- Araar, A., & Duclos, J. (2007). *DASP: Distributive Analysis Stata Package*. PEP, World Bank, UNDP and Université Laval.
- Kakwani, N. (2000). On measuring growth and inequality components of poverty with application to Thailand. *Journal of Quantitative Economics*, 16(1), 67–80.
- Kakwani, N., Khandker, S., & Son, H. H. (2004). *Pro-poor Growth: Concepts and Measurement With Country Case Studies* (No. 1). Brasilia DF, Brazil.
- Ravallion, M. (2004). *Pro-Poor Growth: A Primer* (No. 3242). Washington DC.
- Ravallion, M., & Chen, S. (2003). Measuring pro-poor growth. *Economics Letters*, 78, 93–99. Retrieved from [https://doi.org/10.1016/S0165-1765\(02\)00205-7](https://doi.org/10.1016/S0165-1765(02)00205-7)
- Son, H. H. (2004). A note on pro-poor growth. *Economics Letters*, 82(3), 307–314. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2003.08.003>

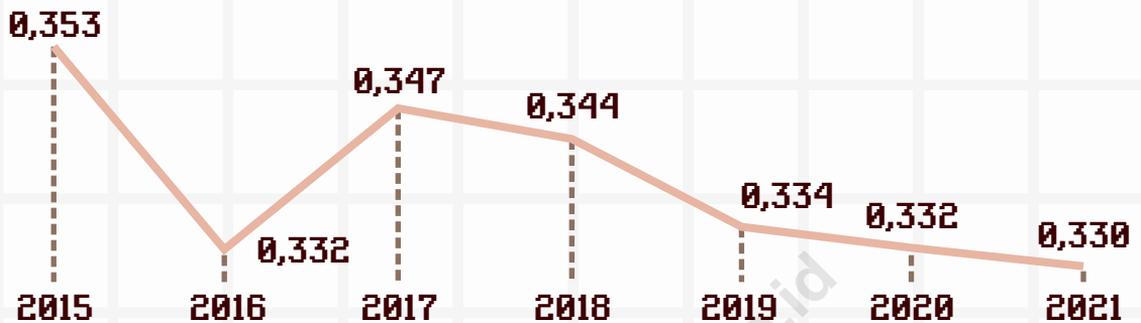
Tema 2. Autokorelasi Spasial Ketimpangan di Kalimantan Selatan





2. AUTOKORELASI SPASIAL KETIMPANGAN DI KALIMANTAN SELATAN

Rasio Gini Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2021



Tentang Autokorelasi Spasial

Berbeda dengan analisis korelasi, autokorelasi spasial memberikan pendekatan yang berbeda berupa identifikasi keterkaitan antara objek-objek yang berdekatan secara geografis.

Korelasi berbalik arah, peningkatan nilai di suatu wilayah justru akan menurunkan nilai di wilayah-wilayah tetangganya.

$$-1 < I < 1$$

Korelasi searah, peningkatan nilai di suatu wilayah juga akan mendorong peningkatan nilai di wilayah-wilayah tetangganya.

Indeks Moran Rasio Gini Kabupaten/Kota 2015-2020



Signifikan:

1. Tabalong
2. Kota Banjarbaru

Signifikan:

1. HSU
2. Tanah Bumbu

Signifikan:

1. Tanah Bumbu

Tema 2

Autokorelasi Spasial Ketimpangan di Kalimantan Selatan

“Welfare’s purpose should be to eliminate, as far as possible, the need for its own existence.”

Ronald Reagan (Presiden Amerika Serikat Periode 1981-1989)

1. Pentingnya Keterkaitan Kesejahteraan antar Wilayah

Output ekonomi suatu daerah berkorelasi dengan daerah-daerah sekitarnya. Negara-negara yang bertetangga cenderung memiliki kondisi demografi, struktur politik, dan kekayaan alam yang serupa. Dalam ruang lingkup antar negara, negara kaya cenderung bertetangga dengan negara kaya lainnya, sementara negara miskin kerap kali bertetangga dengan negara miskin. Hal ini dapat terlihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tinggi yang mengumpul di negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Sementara PDB per kapita rendah mengumpul di negara-negara kawasan Afrika (Dingel dkk, 2019).

Rey (2001) menyelidiki peran ketergantungan spasial dan skala geografis dalam menganalisis ketimpangan regional di Amerika Serikat selama periode 1929-2000. Dengan membagi wilayah menjadi tiga partisi geografis, Rey menunjukkan hubungan positif antara ukuran ketimpangan Theil dan derajat autokorelasi spasial.

Khan dan Siddique (2021) juga mendapatkan bahwa berdasarkan angka indeks Moran's I diperoleh adanya autokorelasi spasial antara ruang dan ukuran ketimpangan regional dan pendapatan. Besaran ketergantungan pendapatan dan ketimpangan regional bervariasi sehingga ukuran ketimpangan regional jauh lebih tinggi daripada ukuran ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan relatif kurang bergantung secara spasial dibandingkan ketimpangan regional.

Wei (2011) telah memperkirakan keterkaitan kegiatan antar daerah yang lebih besar seiring pembangunan infrastruktur dan penyebaran internet. Dai (2006) kemudian menambahkan bahwa transportasi dan komunikasi juga merupakan bagian penting dari jaringan ekonomi regional. Selain itu, infrastruktur jalan yang memadai juga mempengaruhi tinggi atau rendahnya autokorelasi spasial. Kualitas jalan raya yang rendah, tidak memadai, dan padat bisa menghambat distribusi sumber daya (Liu dkk, 2018).

Tingkat autokorelasi spasial menjadi sangat penting dalam proses perumusan kebijakan suatu daerah, terlebih kebijakan pada daerah-daerah regional yang mencakup wilayah-wilayah yang lebih kecil. Seperti kebijakan sebuah provinsi yang akan sangat



mempengaruhi perekonomian kabupaten/kota, tidak hanya bagi provinsi itu sendiri. Pengaruh ini baik bagi kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut maupun dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Ketika tingkat korelasi dan produktivitas ekonomi suatu daerah tinggi, daerah-daerah di sekitarnya cenderung mendapatkan keuntungan ekonomi yang tinggi juga. Hal ini berkaitan dengan perdagangan antar daerah. Peningkatan keuntungan ekonomi ini akan berkaitan dengan penurunan kesenjangan. Begitu juga sebaliknya, ketika tingkat korelasi dan produktivitas ekonomi suatu daerah rendah, daerah-daerah di sekitarnya cenderung memiliki kondisi yang serupa (Dingel & Meng, 2019).

Dengan pentingnya mengidentifikasi tingkat autokorelasi spasial tersebut, penulis berupaya untuk melihat keeratan spasial antar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Kesenjangan menjadi salah satu isu yang masih terdengar dan belum benar-benar mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Dengan wilayah geografis yang cenderung tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di luar Jawa-Bali, dan terbagi ke dalam 13 kabupaten/kota, kesenjangan antar kabupaten/kota masih terasa.

Kabupaten/kota yang mengandalkan produk pertambangan cenderung memiliki ekonomi yang lebih kuat. Barangkali hanya Kota Banjarmasin yang mampu memberikan kontribusi sama besarnya, ibukota yang sudah lebih dulu maju dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Pada indikator kemiskinan,



Kalimantan Selatan terhitung luar biasa. Kalimantan Selatan kerap kali berada pada jajaran teratas provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional. Namun sayangnya di saat yang sama, Kalimantan Selatan dalam tiga tahun terakhir selalu mencatatkan tingkat kesenjangan (rasio gini) ke-13 di Indonesia (BPS, 2021).

Selain sebatas mengidentifikasi tingkat keeratan secara spasial, autokorelasi spasial memberikan gambaran lebih luas terkait peluang terjadinya saling dorong-mendorong antar kabupaten/kota. Tingkat autokorelasi spasial yang tinggi membuka peluang perumusan kebijakan yang saling terintegrasi. Setiap kabupaten/kota dapat menopang sekaligus ditopang oleh kabupaten/kota di sekitarnya. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan begitu saja, karena bagaimana pun setiap masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan yang sama. Pun pada akhirnya pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berkewajiban untuk memberikan hak yang sama bagi seluruh warganya tidak terkecuali siapa pun. Kesetaraan kesejahteraan akan menjanjikan kemajuan pembangunan yang lebih pesat.

2. Bagaimana Analisis Data Spasial Bekerja

Data spasial adalah data yang memuat informasi “lokasi”, jadi tidak hanya “apa” yang diukur tetapi menunjukkan lokasi dimana data itu berada (Banerjee, 2004). Data-data spasial dapat berupa informasi mengenai lokasi geografi seperti letak garis lintang dan garis bujur dari masing-masing wilayah dan perbatasan antar daerah. Secara sederhana data spasial dinyatakan sebagai



informasi alamat. Dalam bentuk yang lain, data spasial dinyatakan dalam bentuk grid koordinat seperti dalam sajian peta ataupun dalam bentuk pixel seperti dalam bentuk citra satelit (Budiyanto, 2010).

Menurut De Mers dalam Budiyanto (Budiyanto, 2010), analisis spasial mengarah pada banyak macam operasi dan konsep termasuk perhitungan sederhana, klasifikasi, penataan, tumpang-susun geometris, dan pemodelan kartografis. Secara umum analisis spasial membutuhkan suatu data data yang berdasarkan lokasi dan memuat karakteristik dari lokasi tersebut. Analisis spasial terdiri dari tiga kelompok yaitu visualisasi, eksplorasi, dan pemodelan. Visualisasi adalah menginformasikan hasil analisis spasial. Eksplorasi adalah mengolah data spasial dengan metode statistika. Sedangkan pemodelan adalah menunjukkan adanya konsep hubungan sebab akibat dengan menggunakan metode dari sumber data spasial dan data non spasial untuk memprediksi adanya pola spasial (Pfeiffer, 2006). Lokasi pada data spasial harus diukur agar dapat mengetahui adanya efek spasial yang terjadi. Menurut Kosfeld dalam Widuandari (2014), informasi lokasi dapat diketahui dari dua sumber yaitu:

a. Hubungan Ketetanggaan (*Neighborhood*)

Hubungan ketetanggaan mencerminkan lokasi relatif dari satu unit spasial atau lokasi ke lokasi yang lain dalam ruang tertentu. Hubungan ketetanggaan dari unit-unit spasial biasanya dibentuk berdasarkan peta. Ketetanggaan dari unit-unit spasial ini diharapkan dapat mencerminkan derajat



ketergantungan spasial yang tinggi jika dibandingkan dengan unit spasial yang letaknya terpisah jauh.

b. Jarak (*Distance*)

Lokasi yang terletak dalam suatu ruang tertentu dengan adanya garis lintang dan garis bujur menjadi sebuah sumber informasi. Informasi inilah yang digunakan untuk menghitung jarak antar titik yang terdapat dalam ruang. Diharapkan kekuatan ketergantungan spasial akan menurun sesuai dengan jarak yang ada.

Hal yang sangat penting dalam analisis spasial adalah adanya pembobot atau sering disebut sebagai matriks pembobot spasial. Matriks pembobot spasial digunakan untuk menentukan bobot antar lokasi yang diamati berdasarkan hubungan ketetanggaan antar lokasi. Pada grid umum ketetanggaan dapat didefinisikan dalam beberapa cara, yaitu:

1. *Rook Contiguity*

Daerah pengamatannya ditentukan berdasarkan sisi-sisi yang saling bersinggungan dan sudut tidak diperhitungkan. Ilustrasi *rook contiguity* dilihat pada Gambar A, dimana unit B1, B2, B3, dan B4 merupakan tetangga dari unit A.



Gambar 2.1. Rook Contiguity

		Unit B2		
	Unit B1	Unit A	Unit B3	
		Unit B4		

2. *Bishop Contiguity*

Daerah pengamatannya ditentukan berdasarkan sudut-sudut yang saling bersinggungan dan sisi tidak diperhitungkan. Ilustrasi untuk *bishop contiguity* dilihat pada Gambar B, dimana unit C1, C2, C3, dan C4 merupakan tetangga dari unit A.

Gambar 2.2. Bishop Contiguity

	Unit C1		Unit C2	
		Unit A		
	Unit C4		Unit C3	

3. *Queen Contiguity*

Daerah pengamatannya ditentukan berdasarkan sisi-sisi yang saling bersinggungan dan sudut juga diperhitungkan. Ilustrasi untuk *queen contiguity* dapat dilihat pada Gambar C, dimana



unit B1, B2, B3, dan B4 serta C1, C2, C3, dan C4 merupakan tetangga dari unit A.

Gambar 2.3. *Queen Contiguity*

	Unit C1	Unit B2	Unit C2	
	Unit B1	Unit A	Unit B3	
	Unit C4	Unit B4	Unit C3	

Pada umumnya ketetanggaan antar lokasi didasarkan pada sisi-sisi utama bukan sudutnya. Matriks pembobot spasial W dapat diperoleh dari dua cara yaitu matriks pembobot terstandarisasi (*standardize contiguity matrix W*) dan matriks pembobot tak terstandarisasi (*unstandardize contiguity matrix W*). Matriks pembobot terstandarisasi merupakan matriks pembobot yang diperoleh dengan cara memberikan bobot yang sama rata terhadap tetangga lokasi terdekat dan yang lainnya nol, sedangkan matriks pembobot tak terstandarisasi merupakan matriks pembobot yang diperoleh dengan cara memberikan bobot satu bagi tetangga terdekat dan yang lainnya nol.

Autokorelasi spasial dikembangkan oleh *University of Washington* pada akhir 1950-an, terutama oleh Michael F. Dacey, William L. Garrison, dan Edward Ullman. Sebelumnya, literatur yang lebih luas telah dikembangkan tentang prinsip kedekatan, yaitu efek kuat yang dimiliki suatu daerah dengan daerah



terdekatnya satu sama lain dibandingkan dengan daerah yang lebih jauh. Hal ini sejalan dengan Hukum Pertama Tobler, “Segala sesuatu terkait dengan yang lainnya, tetapi objek-objek yang dekat lebih terkait daripada dengan objek-objek yang jauh”. Hingga pada tahun 1964, dalam ilmu sosial dan literatur statistik, autokorelasi spasial mulai diistilahkan dengan ‘ketergantungan spasial’, ‘asosiasi spasial’, ‘interaksi spasial’, hingga ‘interdependensi spasial’. Dalam geografi, istilah ‘autokorelasi spasial’ pertama kali disebutkan pada periode 1960-an, dan dikembangkan lebih lanjut pada akhir 1960-an (Fischer dan Getis, 2010).

Secara sederhana, autokorelasi spasial adalah analisis spasial untuk menentukan pola hubungan atau korelasi antar beberapa lokasi pengamatan. Pada aplikasinya dalam ruang lingkup sebuah provinsi, metode ini memberikan informasi penting untuk menganalisis hubungan karakteristik kemiskinan di setiap kabupaten atau kota (Bekti, 2012). Autokorelasi spasial merupakan salah satu metode yang penting dalam statistik spasial. Metode ini menyulitkan, karena memperumit uji statistik, sekaligus inovatif, karena memungkinkan dilakukannya interpolasi spasial (Spatial Data Science, 2016).

Pengukuran autokorelasi spasial untuk data spasial dapat dihitung menggunakan metode *Moran's Index* (Indeks Moran), *Geary's C*, dan *Tango's excess* (Pfeiffer, 2006). Pada penelitian ini, metode analisis hanya dibatasi pada metode Indeks Moran. Indeks Moran merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menghitung autokorelasi spasial secara global. Metode ini dapat digunakan untuk mendeteksi permulaan dari keacakan spasial.



Keacakan spasial ini dapat mengindikasikan adanya pola-pola yang mengelompok atau membentuk tren terhadap ruang. Perhitungan autokorelasi spasial dengan metode Indeks Moran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Indeks Moran dengan matriks pembobot spasial tak terstandarisasi W^* .

$$I = \frac{n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij}^* (x_j - \bar{x})(x_i - \bar{x})}{S_0 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})}$$

dengan $S_0 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}^*$ dan w_{ij}^* merupakan elemen pada pembobot tak terstandarisasi antara daerah i dan j .

2. Indeks Moran dengan matriks pembobot spasial terstandarisasi W .

$$I = \frac{n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij} (x_j - \bar{x})(x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

dengan: I : Indeks Moran

n : banyaknya lokasi kejadian

x_i : nilai pada lokasi i

x_j : nilai pada lokasi j

\bar{x} : rata-rata dari jumlah variabel atau nilai

W_{ij}^* : elemen pada pembobot tak terstandarisasi antara daerah i dan j

W_{ij} : elemen pada pembobot terstandarisasi antara daerah i dan j



Rentang nilai dari Indeks Moran dalam kasus matriks pembobot spasial terstandarisasi adalah $-1 \leq I \leq 1$. Nilai $-1 \leq I < 0$ menunjukkan adanya autokorelasi spasial negatif, sedangkan nilai $0 < I \leq 1$ menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif, sementara nilai Indeks Moran bernilai nol mengindikasikan tidak berkelompok. Nilai Indeks Moran tidak menjamin ketepatan pengukuran jika matriks pembobot yang digunakan adalah pembobot tak terstandarisasi. Untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi spasial atau tidak, dilakukan uji signifikansi Indeks Moran. Uji hipotesis untuk Indeks Moran adalah sebagai berikut.

i. Hipotesis

H_0 : Tidak terdapat autokorelasi spasial.

H_1 : Terdapat autokorelasi spasial.

ii. Tingkat Signifikansi

$\alpha = 5\% (0,05)$

iii. Daerah Kritis

Tolak H_0 pada taraf signifikansi α jika $Z(I) > Z_{1-\alpha}$ dengan $Z_{1-\alpha}$ adalah $(1-\alpha)$ kuantil dari distribusi normal standar, atau tolak H_0 jika $p\text{-value} < \alpha$.

iv. Statistik Uji

$$Z(I) = \frac{I - E(I)}{\sqrt{\text{Var}(I)}} \approx N(0,1)$$

dengan $E(I) = -\frac{1}{n-1}$; $\text{Var}(I) = \frac{n^2 S_1 - n S_2 + 3 S_0^2}{(n^2 - 1) S_0^2} - [E(I)]^2$

$$S_0 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij}; \quad S_1 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (W_{ij} + W_{ji})^2$$

$$S_2 = \sum_{i=1}^n (\sum_{i=1}^n W_{ij} + \sum_{i=1}^n W_{ji})$$



3. Kesejahteraan antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

a. Perkembangan Rasio Gini di Kalimantan Selatan

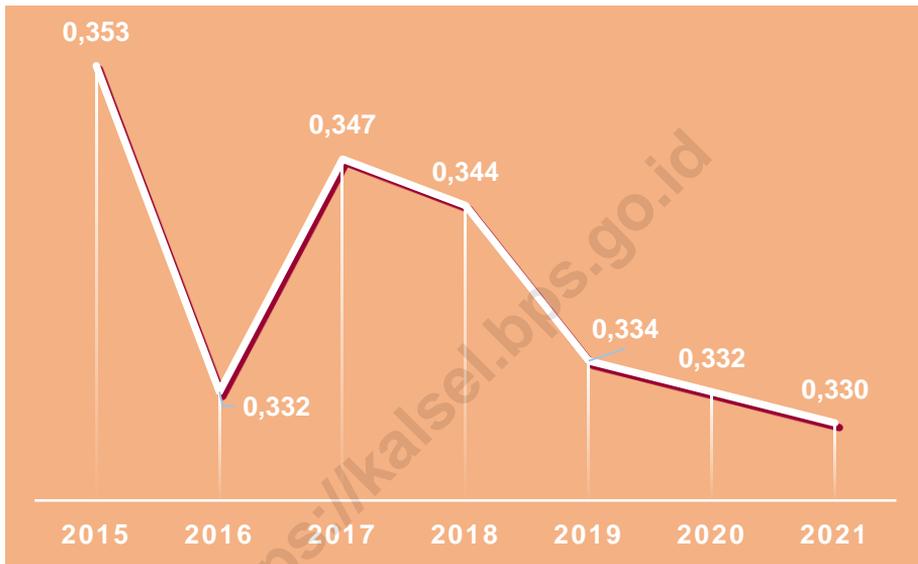
Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah melalui pendekatan yang berbeda-beda. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah rasio gini atau *gini ratio*. Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indikator ini berangkat dari pengeluaran per kapita masing-masing daerah. Nilai rasio gini berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu) dimana jika mendekati 1 mengindikasikan ketimpangan yang semakin tinggi, sementara jika mendekati 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang semakin baik. Dengan basis penghitungan rasio gini yang berasal dari pengeluaran per kapita, maka ada potensi terjadinya autokorelasi spasial antar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Keberadaan autokorelasi spasial pada rasio gini akan menunjukkan sudah sejauh mana progres pemerataan ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan.

Selama periode tahun 2015 hingga 2021, ketimpangan Provinsi Kalimantan Selatan hanya mengalami peningkatan pada tahun 2017, yakni sebesar 0,347 yang mana pada tahun sebelumnya sebesar 0,332. Lebih menarik, di tengah hantaman pandemi Covid-19, angka ini terus mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Padahal, ekonomi Kalimantan Selatan secara umum mengalami pukulan yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sempat menyentuh angka negatif, kemiskinan



meningkat cukup tinggi, hingga ribuan pekerja terdampak pandemi Covid-19. Sehingga, penurunan rasio gini patut diapresiasi.

Gambar 2.4. Rasio Gini Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2021



Sebagai batasan penelitian, hingga proses penulisan, data rasio gini kabupaten/kota tahun 2021 belum dirilis. Sehingga dalam penelitian ini, akan membandingkan nilai autokorelasi spasial rasio gini antar kabupaten/kota sejak tahun 2015 hingga 2020. Perbandingan ini akan menunjukkan perkembangan pemerataan kesejahteraan di Kalimantan Selatan.

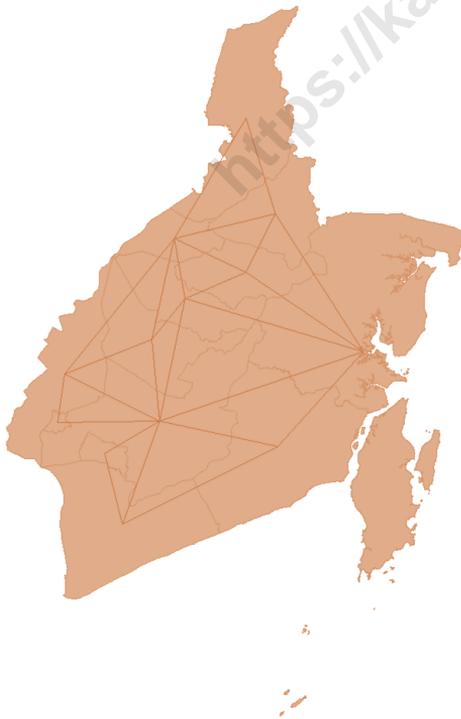
b. Konektivitas Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Kab. Banjar menjadi provinsi dengan konektivitas terbanyak di Kalimantan Selatan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan



delapan kabupaten/kota sekaligus, mulai dari Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Kotabaru, hingga Kota Banjarmasin. Faktor luas wilayah dan letaknya yang berada di tengah-tengah provinsi menjadikan Kab. Banjar memiliki konektivitas yang luas.

Sementara kabupaten/kota yang memiliki konektivitas paling sedikit adalah Kab. Tabalong, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Ketiga wilayah ini hanya berbatasan langsung dengan dua kabupaten/kota. Meski demikian, Kota Banjarmasin merupakan ibukota provinsi dan Kota Banjarbaru merupakan pusat pemerintahan, sehingga sangat menolong perkembangan kedua kota ini. Sementara Kab. Tabalong berbatasan langsung dengan dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

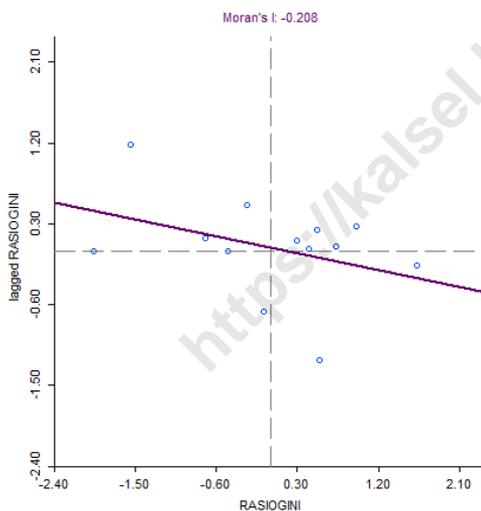


Gambar 2.5. Konektivitas Berdasarkan Kedekatan Wilayah dengan Queen Contiguity



c. Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2015

Indeks Moran rasio gini kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2015 menghasilkan nilai yang negatif, tepatnya -0,208. Angka ini mengindikasikan terjadinya hubungan yang saling berbalik arah antar kabupaten/kota pada tahun tersebut. Peningkatan rasio gini di suatu kabupaten/kota tidak mampu mendorong peningkatan rasio gini di daerah-daerah sekitarnya. Hal ini menunjukkan kesenjangan pembangunan kesejahteraan masyarakat, karena berarti tidak terjadi pembangunan yang merata.



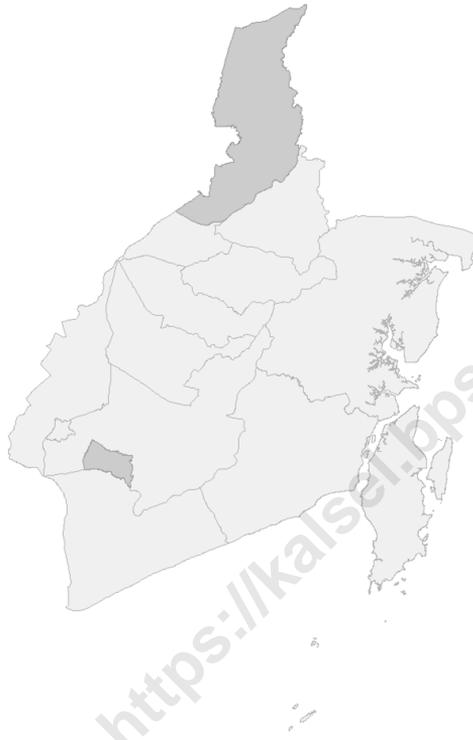
Gambar 2.6. Indeks Moran Rasio Gini Tahun 2015

Signifikansi autokorelasi spasial kemudian juga menunjukkan hasil yang kurang baik. Terhitung hanya Kota Banjarbaru dan Kab. Tabalong yang memiliki nilai autokorelasi spasial yang signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen (0,05). Hal ini berarti autokorelasi spasial tidak terjadi di seluruh kabupaten/kota di



Kalimantan Selatan, melainkan hanya di Kota Banjarbaru dan Kab. Tabalong saja pada tahun tersebut.

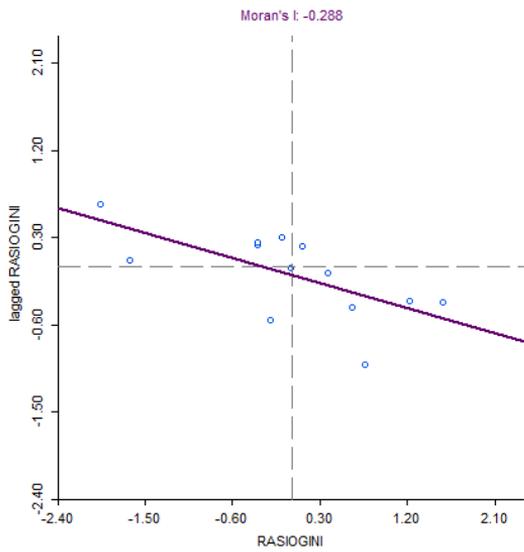
LISA Significance Map: PRC
□ Not Significant (11)
■ p = 0.05 (2)
■ p = 0.01 (0)
■ p = 0.001 (0)



Gambar 2.7.
Hasil Pengujian
Signifikansi
Autokorelasi Spasial
Rasio Gini Tahun
2015

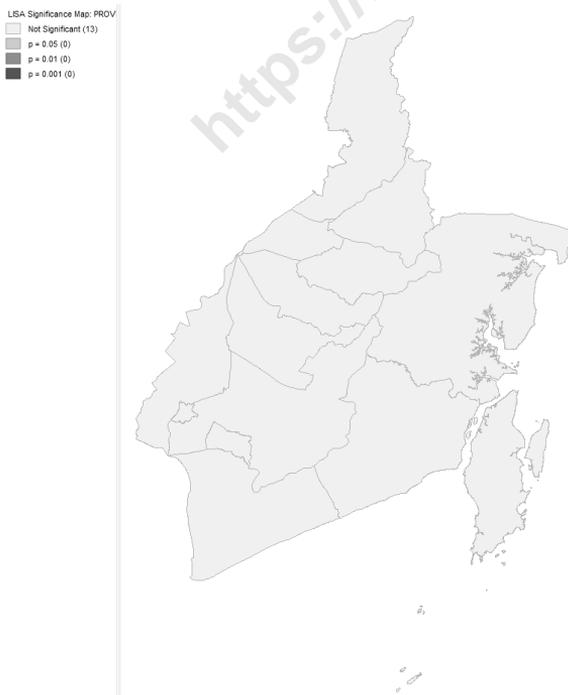
d. Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2016

Terjadi penurunan nilai Indeks Moran rasio gini kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2016. Dari -0,208 di tahun 2015 menjadi -0,288 di tahun 2016. Nilai autokorelasi spasial yang semakin dalam ini menunjukkan ketimpangan yang meningkat terkait dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.8. Indeks Moran Rasio Gini Tahun 2016

Uji signifikansi autokorelasi spasial kemudian juga menunjukkan hasil yang serupa. Tidak ada satu pun nilai autokorelasi spasial yang signifikan.

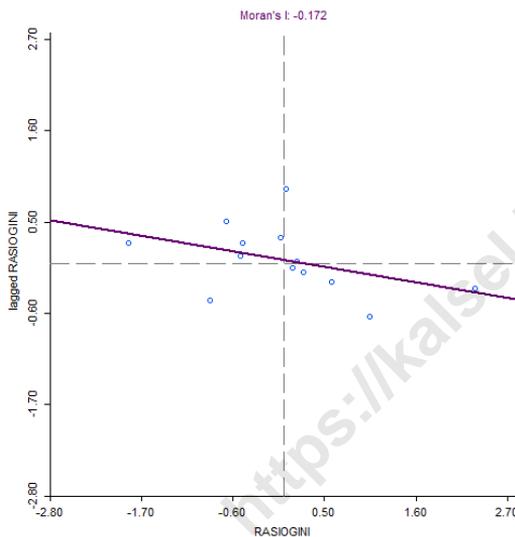


Gambar 2.9. Hasil Pengujian Signifikansi Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2016



e. Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2017

Meski lagi-lagi tidak ada autokorelasi spasial yang signifikan di ke-13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, namun terjadi peningkatan nilai Indeks Moran. Pada tahun 2017, nilai Indeks Moran yang didapatkan adalah sebesar -0,172. Peningkatan yang cukup besar dibanding tahun 2016.



Gambar 2.10. Indeks Moran Rasio Gini Tahun 2017



LISA Significance Map: PRC
Not Significant (13)
 $p = 0.05$ (0)
 $p = 0.01$ (0)
 $p = 0.001$ (0)

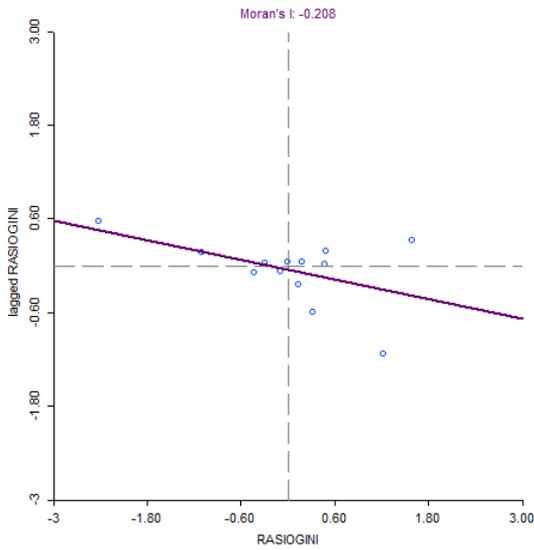


Gambar 2.11. Hasil Pengujian Signifikansi Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2017

f. Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2018

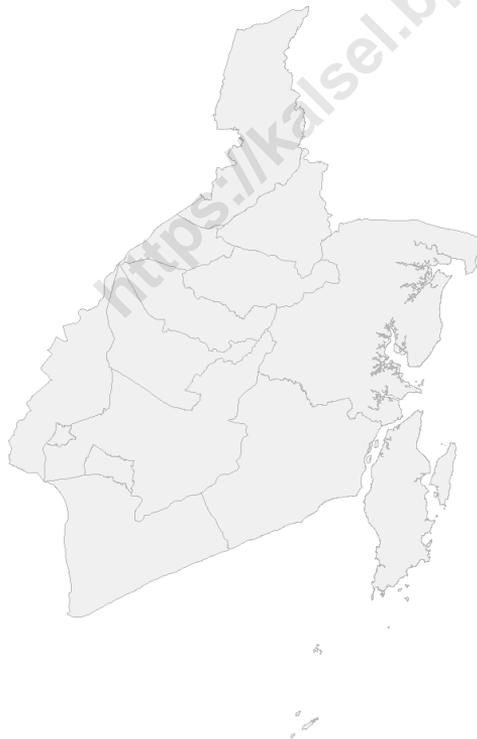
Nilai Indeks Moran tahun 2018 yang didapatkan serupa dengan tahun 2016, yakni sebesar $-0,208$. Nilai ini sendiri menurun dibandingkan dengan tahun 2017. Cukup disayangkan karena pada tahun 2017 telah terjadi peningkatan pemerataan kesejahteraan, namun justru mengalami penurunan pada tahun 2018. Sementara pada uji signifikansi, tidak ada autokorelasi spasial yang signifikan di ke-13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.





Gambar 2.12. Indeks Moran Rasio Gini Tahun 2018

LISA Significance Map: PRC
Not Significant (13)
p = 0.05 (0)
p = 0.01 (0)
p = 0.001 (0)

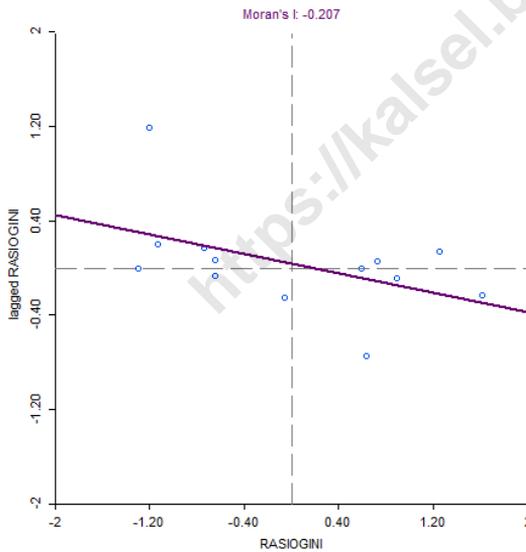


Gambar 2.13. Hasil Pengujian Signifikansi Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2018



g. Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2019

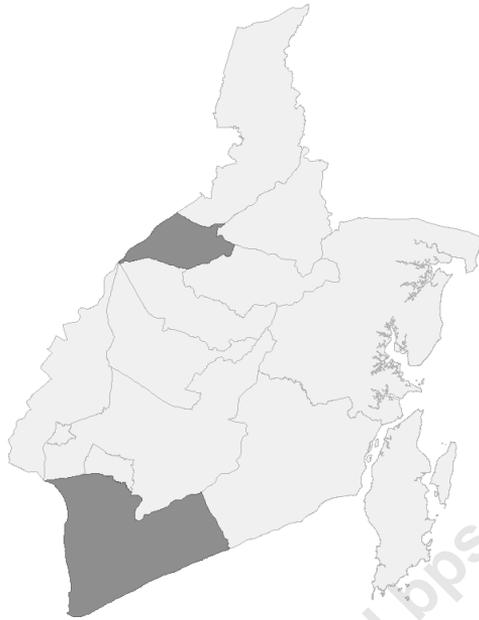
Terjadi perbaikan pemerataan kesejahteraan antar kabupaten/kota pada tahun 2019. Nilai Indeks Moran yang didapatkan pada tahun 2019 adalah sebesar $-0,207$. Masih terjadi arah yang saling berkebalikan antar tetangga kabupaten/kota, namun peningkatan nilai Indeks Moran ini tetap merupakan kabar baik. Terlebih autokorelasi spasial Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Hulu Sungai Utara menghasilkan nilai yang signifikan pada tingkat signifikansi 1 persen (0,01). Sementara ke-11 kabupaten/kota lainnya tidak menghasilkan nilai autokorelasi spasial yang signifikan.



Gambar 2.14. Indeks Moran Rasio Gini Tahun 2019



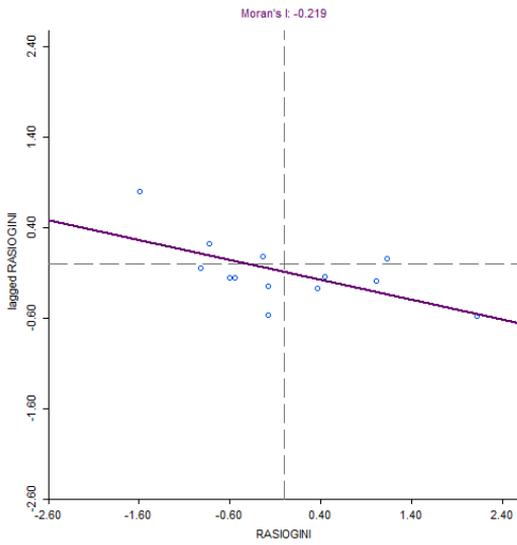
LISA Significance Map: PRC
Not Significant (11)
p = 0.05 (0)
p = 0.01 (2)
p = 0.001 (0)



Gambar 2.15.
Hasil Pengujian
Signifikansi
Autokorelasi Spasial
Rasio Gini Tahun
2019

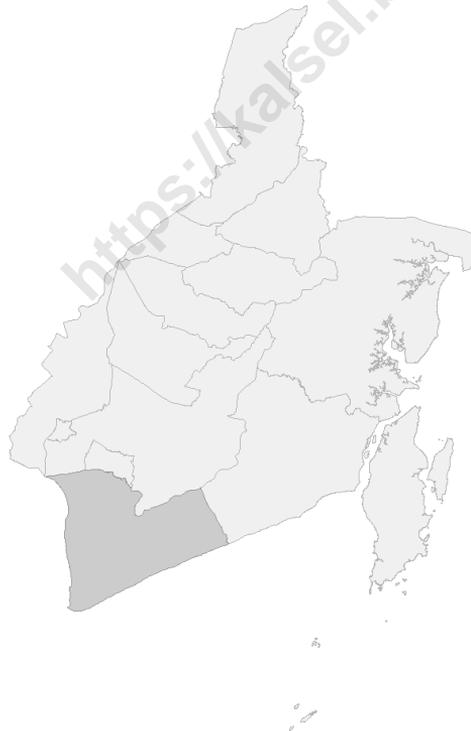
h. Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2020

Terjadi penurunan autokorelasi spasial rasio gini pada masa pandemi, yakni tahun 2020. Nilai Indeks Moran yang didapatkan adalah sebesar $-0,219$. Meski sangat disayangkan, namun penurunan ini bisa diasumsikan akibat faktor yang tidak terduga, yakni serangan pandemi Covid-19. Penurunan ini kemudian diikuti dengan hasil uji signifikansi yang menunjukkan hanya autokorelasi spasial Kab. Tanah Bumbu yang signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen (0,05). Sementara ke-12 kabupaten/kota lainnya tidak signifikan.



Gambar 2.16. Indeks Moran Rasio Gini Tahun 2020

LISA Significance Map: PRC
Not Significant (12)
p = 0.05 (1)
p = 0.01 (0)
p = 0.001 (0)



Gambar 2.15. Hasil Pengujian Signifikansi Autokorelasi Spasial Rasio Gini Tahun 2020



4. Pentingnya Pemerataan Kesejahteraan

Berdasarkan hasil analisis autokorelasi spasial, dapat kita simpulkan bahwa belum terjadi pemerataan kesejahteraan antar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan berdasarkan indikator rasio gini. Indikator ini berakar pada pengeluaran per kapita yang menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Semakin tinggi, maka semakin kuat daya beli masyarakat. Sementara indikator rasio gini sendiri, semakin mendekati angka satu mengindikasikan terjadinya ketimpangan yang semakin besar antar kelompok pengeluaran masyarakat.

Nilai Indeks Moran terbaik didapatkan pada tahun 2017, sebesar $-0,172$. Sepanjang tahun 2015-2020 sendiri selalu didapatkan nilai Indeks Moran yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan terjadinya keterkaitan yang berbalik arah antara suatu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Hal ini sangat disayangkan mengingat konektivitas antar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dikatakan sudah cukup baik. Transportasi darat sudah menjangkau seluruh kabupaten/kota.

Dibandingkan antar kabupaten/kota, Kab. Tanah Bumbu menjadi yang terbaik karena pada tahun 2019 dan 2020 mampu menghasilkan Indeks Moran yang signifikan. Berkebalikan dengan hal tersebut, cukup disayangkan Kab. Banjar tidak menghasilkan Indeks Moran yang signifikan selama tahun 2015-2020. Padahal, Kab. Banjar menjadi kabupaten dengan konektivitas terbanyak karena berbatasan langsung dengan delapan kabupaten/kota sekaligus. Kab. Banjar menjadi salah satu pusat perekonomian



dengan Kota Martapura, perekonomiannya pun terbilang cukup kuat diukur dari nilai Produk Domestik Bruto (PDRB).

Seluruh unsur pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ke depannya harus bekerja sama untuk dapat meningkatkan hal ini. Wilayah Kalimantan Selatan cukup kecil dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain khususnya di luar Jawa-Bali. Seharusnya, persoalan pemertaan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Setiap penguatan ekonomi di suatu kabupaten/kota harus juga mendorong penguatan ekonomi di kabupaten/kota lainnya.

5. Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Tabel Dinamis*. BPS: <https://www.bps.go.id/site/pilihdata> (diakses pada tanggal 29 November 2021).
- Banerjee, S. (2004). *Hierarchical Modeling and Analysis for Spatial Data*. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC.
- Bekti, R. D. (2012). *Autokorelasi Spasial untuk Identifikasi Pola Hubungan Kemiskinan di Jawa Timur*. Computer, Mathematics and Engineering Applications, 3(1).
- Budyanto, E. (2010). *Sistem Informasi Geografis dengan ArcView GIS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Dai, H. W. (2006). *Regional Economy Coordination and Country Economy Development*. Daily Economic Newspaper in Hebei.



- Dingel, J. I. dan Meng, K. (2019). *Spatial correlation and inequality*. VoxEU.org: <https://voxeu.org/article/spatial-correlation-and-inequality> (diakses pada tanggal 29 November 2021).
- Dingel, J. I., Meng, K. C., dan Hsiang, S. M. (2019). *Spatial Correlation, Trade, and Inequality: Evidence from the Global Climate*. NBER Working Paper, 25447.
- Fischer, M. M., dan Getis, A. (2010). *Handbook of Applied Spatial Analysis: Software Tools, Methods and Application*. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Khan, M. S. dan Siddique, A. B. (2021). *Spatial Analysis of Regional and Income Inequality in the United States*. *Economies*, 9(159).
- Wuryandari, T., Hoyyi, A., Kusumawardani, D. S., dan Rahmawati, D. (2014). *Identifikasi Autokorelasi Spasial pada Jumlah Pengangguran di Jawa Tengah Menggunakan Indeks Moran*. *Media Statistika*, 7(1), hal. 1-10.
- Liu, F., Tang, Z., dan Hou, L.. (2018). *Spatial Correlation of Regional Economic Growth and Regional Coordinated Development Research ----- An Empirical Study of Sichuan Province in China*. *International Journal of Economics and Finance*, 11(1), hal. 8-14.
- Pfeiffer, D. (2008). *Spatial Analysis in Epidemiology*. New York: Oxford University Press.
- Rey, S. J. (2001). *Spatial Analysis of Regional Income Inequality*. Munich: University Library of Munich, <https://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpur/0110002.html> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2021).



Spatial Data Science. (2016). *Spatial autocorrelation*. Spatial Data Science: <https://rspatial.org/raster/analysis/3-spauto.html> (diakses pada tanggal 30 November 2021).

Wei, H. K. (2011). *Modern Regional Economics*. Beijing: Economy & Management Publishing House

<https://kalsel.bps.go.id>

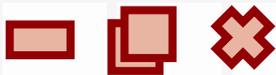




<https://kalsel.bps.go.id>



**Tema 3. Menilik Kesejahteraan
Masyarakat Kalimantan Selatan
Sebelum dan Selama Covid-19**



3. MENILIK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN SELATAN SEBELUM DAN SELAMA COVID-19

Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan

Pada triwulan III-2021, tumbuh sebesar 4,82 persen dibandingkan dengan triwulan II-2021 (year-on-year).



Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Selatan

Pada tahun 2021 meningkat menjadi 4,83 persen, meningkat dari tahun 2020 sebesar 4,38 persen.



Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Selatan

Sebanyak 208,11 ribu jiwa dikategorikan sebagai penduduk miskin pada periode Maret 2021.



Distribusi Pengeluaran Kalimantan Selatan

Pada tahun 2021, sebanyak 20,79 persen penduduk tergolong memiliki pendapatan 40 persen terbawah.



Perubahan Rata-rata Budget Share Kelompok Komoditas Makanan Tahun 2019 dan 2021

Padi dan Umbi

↑ 1,07%



Ikan dan Daging

0,93% ↑

Telur dan Susu

↑ 0,06%



Makanan dan Minuman Jadi

2,04% ↓

Sayur, Buah, Kacang, dll

↓ 0,26%



Pangan Lainnya

0,25% ↑

Tema 3

Menilik Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Selatan Sebelum dan Selama Covid-19

“Until the great mass of the people shall be filled with the sense of responsibility for each other’s welfare, social justice can never be attained.”

Helen Keller (perempuan tunanetra dan tunarungu pertama yang sukses menjadi penulis, dosen, dan aktivis politik)

Warga dunia benar-benar dikejutkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menyebar secara cepat dan masif pada awal tahun 2020. Virus ini dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) setelah pertama kali teridentifikasi di Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir tahun 2019¹.

¹ <https://www.kompas.com/global/read/2021/11/19/113820370/kasus-pertama-covid-19-diduga-adalah-wanita-yang-bekerja-di-pasar-wuhan?page=all>

Negara-negara di dunia dibuat kelimpungan olehnya. Virus menyebar bak tumbuhnya jamur di musim penghujan. Korban keganasan virus ini mulai berjatuhan seiring dengan meningkatnya kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Sektor kesehatanpun perlahan mulai kewalahan. Bahkan gelombang kedua serangan badai pandemi Covid-19 1,5 tahun kemudian jauh lebih dahsyat. Virus yang bermutasi menjadi varian Delta ditengarai menjadi biang keladinya, dan semakin memperburuk situasi kesehatan saat itu. WHO menyebutkan, varian Delta terdeteksi di 132 negara di dunia².

Saat tulisan ini disusun, pandemi belum sepenuhnya berakhir³. Meskipun jumlah orang yang divaksinasi terus menunjukkan peningkatan, namun Covid-19 masih hidup “berdampingan” dengan manusia. Setidaknya sudah 263 juta kasus terinfeksi Covid-19 di seluruh belahan dunia hingga kondisi 1 Desember 2021 berdasarkan data dari www.worldometers.info. Jumlah ini hampir setara dengan jumlah penduduk negara Indonesia, sebuah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia pada tahun 2019. Tingkat kesembuhan Covid-19 dunia sudah mencapai mencapai 90 persen dengan tingkat kematian 1,99 persen. Jika dikonversi ke dalam jumlah nominal, maka kematiannya cukup besar. Dari jumlah kasus yang terinfeksi, ada

² <https://www.jpnn.com/news/peringatan-terbaru-dari-who-soal-keganasan-covid-19-varian-delta>

³ Data diakses dari situs <https://www.worldometers.info/coronavirus/> pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 14.57 WITA



5,2 juta di antaranya berakhir dengan kematian. Jumlah ini setara dengan jumlah penduduk negara Singapura pada tahun 2013.

Negara Indonesia masih lebih beruntung, sebab tingkat kesembuhannya lebih tinggi dari tingkat kesembuhan keseluruhan negara di dunia, yakni mencapai 96,44 persen. Tercatat dari 4,25 juta kasus terkonfirmasi positif Covid-19, dan sebanyak 4,1 juta di antaranya telah dinyatakan sembuh. Sayangnya tingkat kematian akibat Covid-19 Indonesia ternyata lebih tinggi dibandingkan kematian pada level dunia, yakni 3,38 persen.

Gambar 3.1. Jumlah Kasus Kumulatif Terinfeksi Covid-19, Sembuh dan Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia dan Dunia, 1 Desember 2021

 DUNIA	 INDONESIA
Jumlah Kasus Terinfeksi Covid-19	
263.091.506 kasus	4.256.409 kasus
Jumlah kasus sembuh	
237.624.149 kasus	4.104.657 kasus
Tingkat Kesembuhan	
90,32 persen	96,44 persen
Jumlah Kematian Akibat Covid-19	
5.234.022 orang	143.830 orang
Tingkat Kematian Akibat Covid-19	
1,99 persen	3,38 persen

Sumber: <https://www.worldometers.info>



Tingginya tingkat kesembuhan di Indonesia adalah buah dari berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Sekelas Bank Dunia tidak ragu menyampaikan pujiannya kepada Indonesia⁴. Pemerintah benar-benar serius berupaya menekan penyebaran Covid-19 sejak awal merebaknya pandemi. Tercatat berbagai kebijakan ditelurkan pemerintah Indonesia, dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB transisi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga teranyar PPKM dengan empat levelnya. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat, dan berhulu pada pencegahan tersebarnya Covid-19.

1. Covid-19 Berdampak pada Aspek yang Lebih Luas

Covid-19 juga bukan sekadar tentang kesehatan. Jauh lebih luas dari itu. Pandemi Covid-19 juga mengubah tatanan ekonomi, politik, sosial, budaya, pariwisata, pendidikan, transportasi dan aspek lainnya. Oleh karenanya, tak perlu ragu untuk mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah menghantam berbagai sendi kehidupan dari tingkat individu, masyarakat, institusi hingga negara.

Selain kesehatan yang menjadi pertahanan negara melawan serangan Covid-19, finansial dan ekonomi makro negara juga perlahan mulai goyah. Anggaran besar disiapkan untuk membiayai

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210920160945-4-277710/wow-penanganan-covid-ri-dipuji-pejabat-bank-dunia>



penanggulangan Covid-19 serta meng-*counter* dampak lanjutan akibat pandemi yang diderita oleh masyarakat. Beberapa negara hampir *colaps* dan dilaporkan mengalami defisit anggaran akibat mengganasnya Covid-19. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa mengajukan utang⁵.

Beruntungnya Indonesia tidak terjebak pada krisis yang hebat. Indonesia masih mampu bertahan dari terjangan Covid-19. Padahal Indonesia, sebagaimana negara lain umumnya, sudah dua tercatat dua kali mengalami gelombang ganas virus corona. Pertama, pada Januari 2021, dengan puncak kasus harian sebanyak 14 ribu kasus. Kedua, Juli 2021 dengan kasus harian tertinggi lebih dari 56 ribu kasus. Gelombang kedua ini terdeteksi karena ganasnya varian Delta. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sejak akhir tahun 2020. PEN mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk memulihkan perekonomian yang terdampak Covid-19⁶.

Menjelang kuartal IV 2021, kasus Covid-19 di Indonesia memang mulai melandai. Tetapi kewaspadaan tetap harus terjaga, terlebih lagi varian baru Omicron yang ditemukan di beberapa negara Afrika jauh lebih ganas, dengan daya sebar 5 kali dari varian biasa.

Kewaspadaan terhadap pandemi Covid-19 membuat setiap negara sangat berhati-hati dalam memutuskan sebuah kebijakan

⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200902140327-4-183856/sri-mulyani-beberkan-negara-dengan-defisit-parah-akibat-covid>

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200902140327-4-183856/sri-mulyani-beberkan-negara-dengan-defisit-parah-akibat-covid>



terutama yang terkait dengan pemulihan ekonomi. Hadirnya pandemi Covid-19 telah membawa perubahan terhadap dunia, termasuk Indonesia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Upaya untuk menghambat penyebaran virus Covid-19 tampaknya akan terkesan seperti berlawanan arah dengan upaya menggerakkan perekonomian. Sehingga pada saat kebijakan seperti mengurangi mobilitas penduduk akan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan berpotensi meningkatnya kemiskinan. Ini semua dapat menjadi indikator menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat uraian di atas, tulisan ini akan menguraikan seperti apa gambaran singkat beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum dan Provinsi Kalimantan Selatan secara khusus sebelum dan selama pandemi Covid-19. Indikator-indikator kesejahteraan tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan konsumsi masyarakat.

2. Ekonomi pada Akhirnya Mengalami Resesi

Sebelum pandemi terjadi, ekonomi Indonesia tumbuh relatif stabil pada angka 4 – 5 persen setiap kuartalnya (yoy⁷). Kuartal I-2020 mulai menunjukkan adanya pelemahan. Pada periode ini terdapat momen kasus pertama Covid-19 ditemukan di Indonesia.

⁷ Pertumbuhan kuartal year on year (yoy) atau pertumbuhan tahun ke tahun adalah perbandingan nilai produk domestik bruto (PDB)/produk domestik regional bruto (PDRB) kuartal harga konstan saat tahun t terhadap kuartal yang sama pada tahun t-1.



Setelahnya, ekonomi Indonesia berada pada masa yang sulit sejak kuartal II-2020 hingga kuartal I-2021. Indonesia secara resmi masuk dalam jurang resesi, karena mencatatkan pertumbuhan (yoy) terkontraksi hingga di bawah nol selama 4 kuartal berturut-turut. Pertumbuhan (yoy) minus menunjukkan roda ekonomi berjalan mundur dibandingkan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya.

Mundurnya roda ekonomi menjadi petunjuk yang nyata Covid-19 memukul kinerja ekonomi. Dari sisi lapangan usaha, sektor yang paling terdampak adalah sektor transportasi dan pergudangan, sektor akomodasi dan penyediaan makan-minum, serta sektor perdagangan. Aktivitas ekonomi pada sektor-sektor tersebut menjadi sangat terbatas. Bahkan beberapa pelaku usaha di antaranya sampai gulung tikar, karena tidak mampu memproduksi dan menutup biaya operasional.

Sementara dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen di PDB Indonesia mencatatkan minus sepanjang 2020. Sebagai gambaran pada kuartal II 2021, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 57,66 persen terhadap PDB terkontraksi hingga 2,63 persen⁸. Beruntung, perlahan ekonomi Indonesia menuju perbaikan. Satu tahun kemudian, Indonesia lepas dari resesi dengan mencatatkan pertumbuhan (yoy) positif 7,07 persen. Sedangkan pada kuartal III 2021, meski masih mencatatkan pertumbuhan (yoy) positif, namun pertumbuhannya lebih rendah

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210206080350-532-603013/penyebab-pertumbuhan-ekonomi-ri-minus-207-persen-pada-2020>



rendang dibandingkan kuartal I 2021, sebagai dampak dari gempuran varian Delta.

Gambar 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (yoy) Kuartal I 2018 -Kuartal III 2021



Sumber: BPS

Situasi yang sama dialami pula oleh Kalimantan Selatan. Ekonomi provinsi ini mengalami resesi pada periode yang sama dengan Indonesia, setelah sebelumnya tumbuh pada range 3 hingga 5 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi (yoy) Provinsi Kalimantan Selatan terkontraksi selama 4 kuartal sejak kuartal kedua 2020 hingga kuartal pertama 2021. Kuartal selanjutnya terus membaik. Kuartal pertama tumbuh 4,41 persen (yoy) dibandingkan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Bahkan perbaikannya terus berlanjut hingga kuartal III 2021, dengan pertumbuhan mencapai 4,82 persen (yoy).

Baik Indonesia maupun Kalimantan Selatan, membaiknya perekonomian dicirikan dengan positifnya pertumbuhan ekonomi



(yoy) pada tahun 2021 karena dibandingkan terhadap 2020 yang tumbuh minus. Namun jika dibandingkan terhadap 2019, belum tentu menghasilkan kesimpulan yang sama. Hal ini tergambar dari level atau nilai dari PDB/PDRB harga konstan 2021 yang masih di bawah 2019. Sebagai gambaran nilai PDRB Provinsi Kalimantan Selatan pada kuartal III 2019 sebesar Rp34,99 Triliun, sementara kuartal III 2021 sebesar Rp34,87 triliun. Capaian di tahun 2021 masih di bawah 2019 atau masa sebelum pandemi. Namun demikian, setidaknya sudah menggambarkan upaya perbaikan dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi bahkan sampai mengalami resesi.

Gambar 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan (yoy)
Kuartal I 2015 - Kuartal III 2021



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan



3. Perangkap Kemiskinan Semakin Menganga

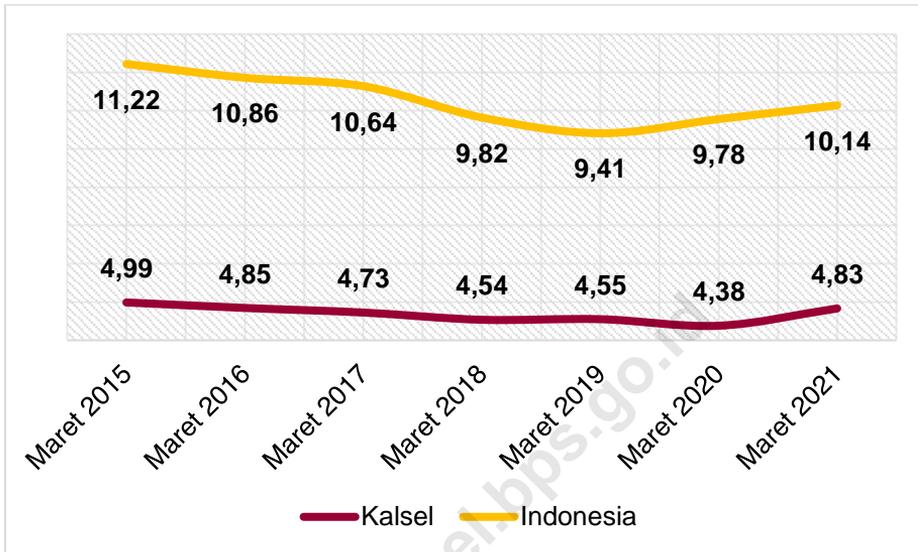
Indikator lain untuk melihat kesejahteraan masyarakat suatu daerah adalah dengan melihat situasi kemiskinan, khususnya kemiskinan makro. Kemiskinan dan kesejahteraan sendiri adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Semakin rendah tingkat kemiskinan semakin tinggi kesejahteraan. Sebaliknya meningkatnya tingkat kemiskinan memberikan arti menurunnya tingkat kesejahteraan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah memprediksi akan terjadinya lonjakan tingkat kemiskinan akibat pandemi Covid-19⁹. Prediksi ini benar-benar terbukti. Baik dari sisi persentase dan jumlah, kemiskinan mengalami peningkatan baik Indonesia maupun Kalimantan Selatan dan hampir seluruh provinsi di Indonesia. Padahal sebelum pandemi, Indonesia menorehkan prestasi dengan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan pada level 1 digit. Maret 2019, BPS mencatat kemiskinan yang relatif rendah sebesar 9,41 persen. Setelahnya pada Maret 2020, bersamaan dengan awal mula pandemi, kemiskinan Indonesia meningkat 9,78 persen. Peningkatan ini nyatanya terus berlanjut menjadi 10,14 persen pada Maret 2021. Dengan demikian kemiskinan kembali menyentuh level 2 digit.

⁹ <https://puspensos.kemensos.go.id/potret-kemiskinan-di-tengah-pandemi-covid-19> di akses 2 Desember 2021 15:33 WITA



Gambar 3.4. Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Kalimantan Selatan, Maret 2015 – Maret 2021



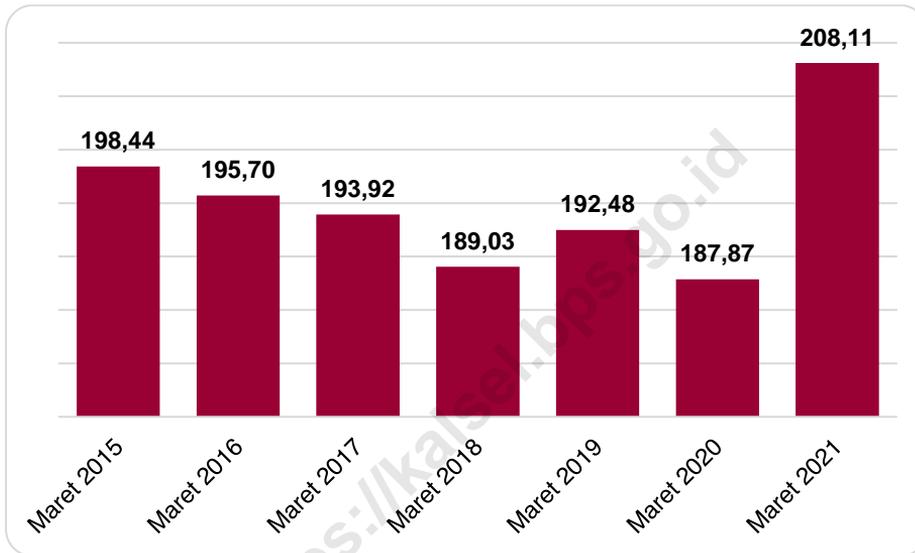
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Situasi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Perbedaannya hanya pada Maret 2020, yang masih mengalami penurunan menjadi 4,38 persen. Berbeda dengan Indonesia, yang justru meningkat pada Maret 2020. Ini dapat terjadi karena dampak pandemi belum menyentuh sepenuhnya pada masyarakat Kalimantan Selatan. Baru pada Maret 2021, dampak pandemi telah mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan Kalimantan Selatan menjadi 4,83 persen. Persentase ini setara dengan 208,11 ribu jiwa penduduk Kalimantan Selatan yang berada di bawah garis kemiskinan. Cukup jauh meningkat jika dibandingkan kondisi Maret 2020 yang hanya



187,87 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Maret 2021 bahkan lebih tinggi jika dibandingkan Maret 2017 hingga Maret 2019.

Gambar 3.5. Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Selatan,
Maret 2015 – Maret 2021 (Ribu Jiwa)



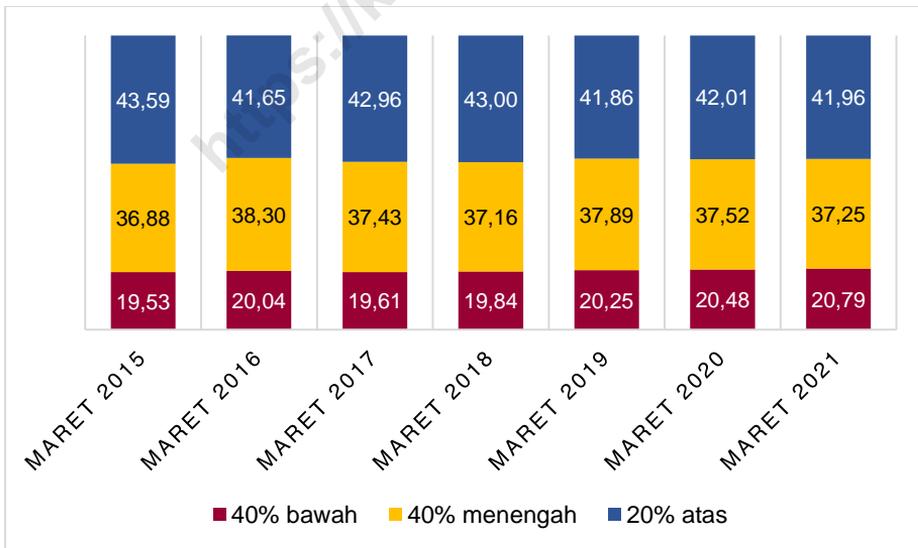
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Penekanan penting yang dapat diambil dari situasi di atas adalah pandemi berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan memang yang paling merasakan pahitnya pandemi, meski juga tidak menutup kemungkinan mereka yang berada pada lapisan di atasnya. Sebab mereka ini rentan terjerumus pada perangkat kemiskinan. Perangkat kemiskinan semakin menganga. Pada satu sisi garis kemiskinan semakin meningkat, dari Rp497.262,- pada Maret 2020 menjadi Rp519.150 pada Maret 2021. Pada sisi lainnya



pendapatan masyarakat justru kesulitan meningkat. Ini tergambar dari Gambar 3. Grafik pada Gambar 3 menunjukkan sebaran jumlah penduduk menurut kelompok pengeluaran. Berdasarkan pengeluarannya, penduduk dibagi menjadi tiga kelompok yakni 20 persen teratas, 40 persen menengah dan 40 persen terbawah. Pada Maret 2021 terjadi pergeseran komposisi penduduk. Persentase penduduk 40 persen terbawah meningkat menjadi 20,79 persen dari sebelumnya 20,48 persen pada Maret 2020. Sementara 40 persen menengah dan 20 persen teratas mengalami penurunan. Ini membawa kemungkinan terjerembapnya penduduk pada golongan menengah dan atas pada palung kemiskinan.

Gambar 3.6. Distribusi Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran, Maret 2015 – Maret 2021



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan



Mengapa golongan menengah dan atas dapat masuk jurang kemiskinan? Situasi pandemi memaksa banyak orang harus berusaha keras dan memutar otak agar tetap bertahan hidup. Penerapan PSBB hingga PPKM semakin memperburuk situasi. Sebab roda perekonomian melambat, dan bahkan berhenti sementara. Akibatnya sebagian besar masyarakat, bukan hanya lapisan bawah, namun juga di atasnya mengalami penurunan pendapatan, bahkan ada yang harus kehilangan mata pencahariannya. Kondisi inilah yang membuat jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat.

Masyarakat miskin sendiri umumnya meskipun mempunyai pekerjaan, namun pekerjaan tersebut termasuk dalam kategori informal dan usaha mikro-kecil, seperti misalnya sebagai pedagang kecil, asongan, kaki lima, dan atau keliling, serta buruh kasar. Padahal perdagangan dan penyediaan makan-minum adalah sektor yang cukup dalam terdampak pandemi. Pedagang dan penyedia makan-minum kecil seperti ini mengalami penurunan omset, pengurangan jam kerja, penurunan produksi, bahkan sebagiannya tutup. Sebagian kecil masyarakat miskin bertahan dengan penjualan sistem *online*. Namun jumlahnya tidak begitu banyak, sebab masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan digitalnya.

4. Konsumsi Masyarakat Terdampak Karena Pandemi

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan adalah konsumsi. Konsumsi yang tinggi dapat mencerminkan kesejahteraan yang tinggi. Pendekatan konsumsi



ini digunakan oleh penelitian dari Fitriana (2021) untuk melihat apakah terjadi perubahan tingkat kesejahteraan sebelum pandemi (Maret 2019) dan pada saat pandemi (Maret 2021) masyarakat Kalimantan Selatan. Dengan menggunakan pemodelan *Linear Approximation/Almost Ideal Demand System* atau LA/AIDS diperoleh nilai elastisitas dan *Compensating Variation* (CV). CV menjadi ukuran representasi dari kesejahteraan (*welfare*). Besaran CV yang diperoleh terhadap data Susenas Maret 2019 dan Susenas Maret 2021 Kalimantan Selatan memberikan hasil sebesar 17,18 persen atau dalam nominal Rupiah setara Rp214.842. Besaran CV yang positif mengindikasikan adanya penurunan *welfare*. Kesimpulan ini memperkuat indikator kesejahteraan sebelumnya yang juga menurun sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Penelitian Fitriana (2021) juga menemukan pola konsumsi masyarakat Kalimantan Selatan yang mengalami perubahan sebelum dan selama pandemi Covid-19. Selama masa pandemi, nilai *budget share*¹⁰ kelompok makanan jadi paling besar penurunannya. Penurunannya mencapai 2 poin persen. Kompensasi akibat penurunan makanan jadi adalah meningkatnya *budget share* kelompok komoditas padi-padian dan umbi-umbian. Ini dapat diartikan masyarakat Kalimantan Selatan mengurangi mengkonsumsi makan jadi di luar rumah dan menggantinya dengan memasak di rumah.

¹⁰ Besaran secara persentase pengeluaran suatu komoditas terhadap total pengeluaran seluruh komoditas



Tabel 3.1. Rata-rata *Budget Share* Kelompok Komoditas
Makanan Tahun 2019 dan Tahun 2021 (Persen)

Kelompok Komoditas	2019	2021	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-padian dan umbi-umbian	11,87	12,94	1,07
Telur dan susu	5,67	5,73	0,06
Sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, lemak dan minyak	17,05	16,79	-0,26
Ikan dan daging	14,64	15,57	0,93
Makanan dan minuman jadi	35,23	33,19	-2,04
Pangan lainnya	15,54	15,78	0,25
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Fitriana (2021) diolah dari data Susenas Maret 2019 dan Maret 2021

Fenomena *welfare loss* ini secara tidak langsung berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat. Masyarakat mengurangi tingkat konsumsinya dan atau melakukan substitusi makanan dari kualitas tinggi ke makanan kualitas rendah. Dengan demikian akan berdampak pada kemiskinan. Hasil penelitian ini semakin memperkuat dampak pandemi yang menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Ini sejalan dengan hasil penelitian dari Kurniasih (2020) yang melihat dampak pandemi Covid-19 terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat kota Pontianak. Hasil wawancara peneliti terhadap penduduk miskin di Kota Pontianak menunjukkan hampir semua mengatakan terjadi penurunan pola



konsumsi, baik secara drastis maupun perlahan. Responden menyebutkan melakukan beberapa penyesuaian kebutuhan atau menghilangkan beberapa jenis pengeluaran keluarga yang masih memungkinkan. Ini adalah salah bentuk siasat agar kebutuhan hidup tercukupi selama pandemi. Jika sebelum pandemi masyarakat mempunyai banyak pilihan konsumsi terhadap komoditas lauk, maka selama pandemi mereka membatasi dan atau mensubstitusinya pada komoditas lain yang lebih terjangkau. Begitu pula penurunan konsumsi belanja makanan jadi. Ada pengurangan pengeluaran untuk makanan jadi, dan disubstitusi dengan membawa bekal dari rumah, agar dapat menghemat pengeluaran.

5. Bangkit dari Pandemi Covid-19

Berdasarkan uraian di atas didapat poin penting bahwa pandemi Covid-19 berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini dicirikan dengan indikator pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi, kemiskinan yang meningkat dan terjadinya *welfare loss*.

Kondisi ini memaksa setiap orang untuk melakukan penyesuaian agar mereka dapat bertahap hidup di tengah situasi pandemi. Penyesuaian mengubah gaya hidup, cara bersosial, sistem sekolah, dan metode bekerja, serta lainnya. Penyesuaian ini tentu saja diharapkan tetap mengedepankan himbuan pemerintah agar selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, serta menjauhi kerumunan.



Meskipun di lapangan tidak semuanya berjalan sesuai harapan. Terlebih bagi mereka yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Alhasil masyarakat mulai terbiasa dengan usaha *online*, menggunakan masker di tempat umum, bersekolah dengan sistem *online*, bekerja dengan sistem *Work From Home* (WFH), beribadah dan beraktivitas di fasilitas publik dengan menjaga jarak.

Poin penting kedua adalah tentang penyesuaian pekerjaan. Masyarakat berusaha keras agar tetap punya penghasilan meskipun cara, sistem dan jenis pekerjaan jauh berbeda dengan saat sebelum pandemi. Adaptasi ini menjadi jalan keluar agar tingkat kesejahteraan dapat kembali normal sebagaimana sebelum pandemi.

Poin terakhir adalah implikasi dari sebuah kebijakan semasa pandemi. Ada dua upaya yang harus diperhatikan berdasarkan hasil kajian dari tulisan ini. Pertama, tetap ada upaya dalam mencegah penyebaran virus Corona dengan mengambil berbagai kebijakan yang relevan. Kedua, tetap ada upaya dalam mencegah semakin memburuknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sepintas memang terlihat ada dua hal kontradiktif pada kedua jenis upaya di atas. Sebagai contoh sederhana, jika membatasi mobilitas untuk mencapai tujuan pertama, maka tujuan pada poin kedua akan sulit tercapai. Sebab membatasi mobilitas akan memperlambat bahkan menghentikan roda ekonomi.

Berkaca pada kebijakan yang diambil pemerintah selama ini, yang tetap mempertahankan keduanya secara bergiliran maka kita optimis tujuan pada upaya pertama dan kedua dapat tercapai.



Kebijakan ini dikenal dengan nama kebijakan gas dan rem¹¹. Saat Covid-19 melandai, maka pemulihan ekonomi mulai digas. Sebaliknya saat Covid-19 melanda, maka pemulihan ekonomi mulai direm. Semoga Pemerintah bersama masyarakat di seluruh Indonesia dan termasuk di Kalimantan Selatan mampu memutuskan dan menjalankan kebijakan dengan sebaik-baiknya agar kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara dapat tercapai. Pandemi berakhir dan ekonomi kembali pulih sehingga kesejahteraan masyarakat kembali terangkat.

6. Referensi

- BPS. (2021). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021*. Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th. XXIV, 15 Juli 2021.
- BPS. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2020*. Berita Resmi Statistik No. 83/11/Th. XXIV, 5 November 2021.
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2021). *Kondisi Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Maret 2021*. Berita Resmi Statistik No. 037/07/63/Th. XXV, 15 Juli 2021.
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2021). *Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Triwulan III-2020*. Berita Resmi Statistik No. No. 58/11/Th. XXIV, 05 November 2020.
- Fitriana, Yulia. (2021). *Pola Konsumsi Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Selatan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 (Penerapan Model LA/AIDS pada Data Susenas*

¹¹ <https://www.merdeka.com/uang/airlangga-kebijakan-gas-dan-rem-efektif-tangani-pandemi.html>



Maret 2019 dan Maret 2021). Tesis. Universitas Lambung Mangkurat.

Kurniasih, Erni Panca. (2020). *Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak*. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020. P.277-289.

Berita Daring

<https://www.kompas.com/global/read/2021/11/19/113820370/kasu-s-pertama-covid-19-diduga-adalah-wanita-yang-bekerja-di-pasar-wuhan?page=all> diakses pada 1 Desember 14.45 WITA

<https://www.jpnn.com/news/peringatan-terbaru-dari-who-soal-keganasan-covid-19-varian-delta> diakses pada 1 Desember 16.04 WITA

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210920160945-4-277710/wow-penanganan-covid-ri-dipuji-pejabat-bank-dunia> diakses pada 2 Desember 2021 Pukul 10.25 WITA

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200902140327-4-183856/sri-mulyani-beberkan-negara-dengan-defisit-parah-akibat-covid> diakses pada 9 Desember 2021 Pukul 08.23 WITA

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210206080350-532-603013/penyebab-pertumbuhan-ekonomi-ri-minus-207-persen-pada-2020> diakses pada 1 Desember 2021 Pukul 13.52 WITA



<https://puspendos.kemensos.go.id/potret-kemiskinan-di-tengah-pandemi-covid-19> diakses pada 6 Desember 2021 Pukul 15.22 WITA

<https://www.merdeka.com/uang/airlangga-kebijakan-gas-dan-rem-efektif-tangani-pandemi.html> diakses pada 6 Desember 2021 Pukul 09.40 WITA

<https://www.worldometers.info/coronavirus/> diakses pada 1 Desember 2021 Pukul 15.20 WITA

<https://kalsel.bps.go.id>





Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Analisis Isu Terkini Provinsi Kalimantan Selatan

E-book publikasi ini dapat diunduh di:
<http://s.bps.go.id/AIT-Kalsel>
atau pindai QR Code di samping dengan aplikasi scanner



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Soekarno Hatta (Trikora) No. 7 Banjarbaru Kalsel 70713
Telp. 0511-6749001; Homepage: <http://kalsel.bps.go.id>
E-mail: bps6300@bps.go.id

ISBN 978-623-7660-21-7



9 786237 660217